

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*) maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Untuk membangun akuntabilitas kinerja, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mengimplementasikan ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya penyempurnaan dari ISO 9001:2008 serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kehutanan yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik yang dilakukan melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi.

Laporan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai arahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka skala penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Klasifikasi	Predikat	Kode
1.	85% - 100%	Sangat Baik	
2.	69% - 84%	Baik	
3.	53% - 68%	Cukup	
4.	< 53%	Gagal	

Sumber: Arahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

### 3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Tahun Anggaran 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran Pembangunan Kehutanan sebesar Rp. 23.020.982.989,- yang berasal dari dana APBD dan dari dana dekonsentrasi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebesar Rp. 930.400.000,-, dari dana DBH-DR sebesar Rp. 14.744.646.000,-. Alokasi dana APBD, jika dibandingkan dengan alokasi dana Tahun Anggaran 2016 yaitu Rp. 15.569.840.425,- terjadi peningkatan sebesar 242,56%. Alokasi dana APBD terdiri dari Belanja Langsung Kegiatan yaitu sebesar Rp. 30.209.059.389,- dan Belanja Langsung Pokok sebesar Rp. 7.556.569.600,-.

Seluruh anggaran tersebut diatas digunakan untuk mencapai empat sasaran pembangunan kehutanan yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Empat sasaran tersebut adalah:

1. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
2. Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat.
3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat.
4. Meningkatnya tata kelola organisasi.

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas maka dilakukan pengukuran kinerja dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan membandingkan realisasi kinerja dengan standar serta membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja provinsi lain yang berdekatan. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam Tabel 10. selanjutnya akan

dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 11 berikut ini.

Tabel 11. Pencapaian IKU Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017

2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Kode
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan	100%	100%	100	
		Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	81%	82.87	102.30	
		Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kehutanan	81%	85.63	105.72	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi I					102.67	
2.	Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase penurunan luas lahan kritis	0.43%	0.43	100	
		Persentase penurunan luas kerusakan hutan	4.15%	9.92	239.04	
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	10%	88.21	882.10	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi II					407.05	
3.	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	8.50%	15.39	181.06	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategi III					181.06	
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kineerja	BB	BB	100	
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	95%	86.44%	90.98	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategi IV					95.49	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I s/d IV					211.24	

Sumber: Diolah dari data Primer, penetapan kinerja dan monev pembangunan kehutanan 2017

Dari Tabel 11 diatas dapat dilihat hasil pengukuran kinerja menunjukan 4 (empat) sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2017 berhasil mencapai tingkat capaian yang telah ditetapkan dengan rata-rata pencapaian sasaran strategis sebesar 211.24% yang termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

Dari sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis yang terdapat pada tabel diatas dapat dilihat secara umum bahwa pencapaian kinerja pada kategori berhasil (sesuai bahkan beberapa indikator capaiannya melebihi target). Capaian realisasi indikator tertinggi adalah Persentase penurunan jumlah *hot spot* dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) hal ini disebabkan pada Tahun 2017 kondisi cuaca dan iklim di Sumatera Barat tidak terlalu panas dan sering hujan.

Hasil pencapaian kinerja sebagaimana tergambar dalam Tabel 11 diatas merupakan kumulatif dari pencapaian program yang bersumber pada realisasi target kinerja kegiatan yang secara lengkap dapat diilustrasikan pada realisasi capaian kinerja kegiatan. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran pembangunan kehutanan diatas merupakan hasil realisasi program/ kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bersama oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

### **3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada Tabel 11 selanjutnya sub bab ini akan menguraikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis.

Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja (*outcome*) sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut:

### **I. Meningkatkan Produktivitas dan Pengelolaan Hasil Hutan Lestari**

Tujuan **Meningkatkan Produktivitas dan Pengelolaan Hasil Hutan Lestari** dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu **Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan** dan diukur dengan tiga indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian diatas dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Tujuan dan Sasaran Strategis I

<b>TUJUAN 1</b>	<b>SASARAN 1</b>
Meningkatkan Produktivitas dan Pengelolaan Hasil Hutan Lestari	Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

“Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan” merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi untuk lestarnya pengelolaan hutan khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Luas kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat adalah  $\pm 2.380.057$  Ha atau 56,27% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat ( $\pm 4.229.730$  Ha) dengan fungsi kawasan hutan yang terbesar yaitu Hutan Lindung ( $\pm 791.671$  Ha) dan Hutan Produksi ( $\pm 360.608$  Ha), memiliki potensi hutan yang harus dimanfaatkan baik hasil hutan maupun penggunaan kawasan hutan secara optimal. Optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan merupakan satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan. Jika produktivitas hutan meningkat maka diharapkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera dapat terwujud. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran 1 disajikan dalam Tabel 13 berikut ini.

Tabel 13. Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2017

<b>No</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
1.	Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100
		Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK	81%	82,87%	102,30
		Optimalisasi PNBK sektor kehutanan	81%	85,63%	105,72
<b>Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)</b>					<b>102,67</b>

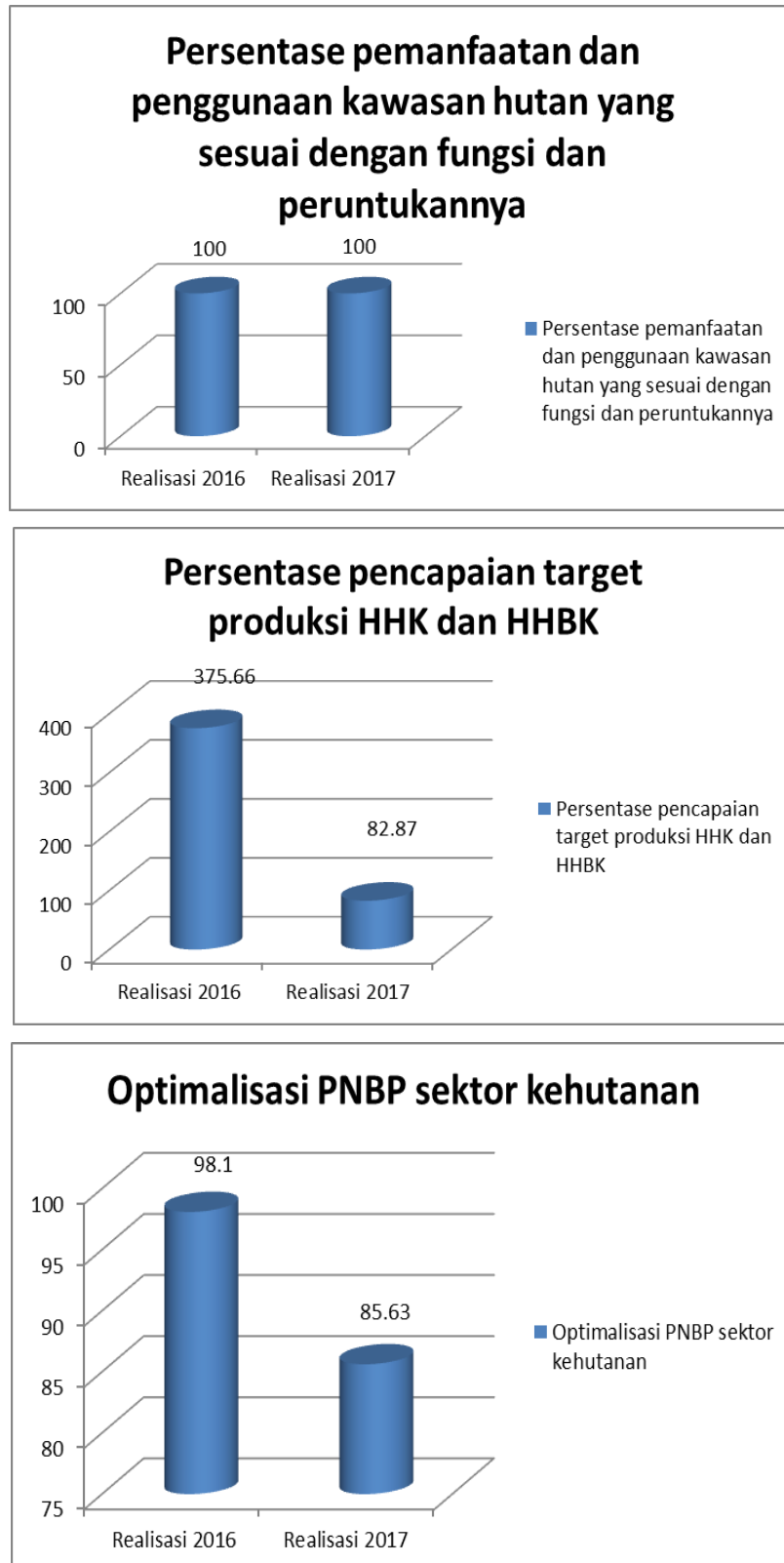
Dari Tabel 13 tersebut terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis I pada Tahun 2017 berhasil dicapai dengan baik. Rata-rata capaian sasaran 102,67% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 102,67% diatas adalah potensi kawasan hutan Sumatera Barat telah termanfaatkan dengan optimal sesuai target yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur.

Tabel 14. Perbandingan capaian kinerja Sasaran Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2016 dan Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2017	Realisasi	
			2016 (n-1)	2017 (n)
Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK	81%	375,66%	82,87%
	Optimalisasi PNPB sektor kehutanan	81%	98,10%	85,63%

Dari Tabel 14 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing indikator diatas untuk indikator kinerja 1 yaitu Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya terealisasi sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Indikator kinerja 2 yaitu Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK terealisasi 82,87% lebih rendah 292,79% dibandingkan tahun sebelumnya namun capaian indikator kinerja 2 pada Tahun 2017 tetap terealisasi melebihi target yaitu 102,30%. Indikator kinerja 3 yaitu Optimalisasi PNPB Sektor Kehutanan terealisasi 98,10% atau turun 12,47% dibandingkan tahun sebelumnya namun capaian kinerja indikator kinerja 3 diatas masih melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2017. Dari realisasi ketiga indikator kinerja di atas artinya pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sudah optimal dan melebihi target yang ditetapkan pada Tahun 2017.

Capaian kinerja Sasaran Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2016 dan Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Capaian kinerja Sasaran Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra/ RPJMD	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100
	Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK	85%	82,87%	97,49
	Optimalisasi PNPB sektor kehutanan	85%	85,63%	100,74

Tabel 15 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing indikator diatas jika dibandingkan dengan target kinerja pada akhir RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sangat baik, hal ini dapat dilihat dari uraian capaian masing-masing indikator kinerja terhadap capaian akhir RPJMD Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja 1 yaitu Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya pada tahun kedua Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tingkat kemajuannya 100% sesuai dengan target akhir Renstra yaitu 100%, hal ini disebabkan hingga akhir Renstra target capaian indikator kinerja di atas tetap 100%.
- b. Indikator kinerja 2 yaitu Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK pada tahun kedua Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tingkat kemajuannya 97,49% atau melebihi target tingkat kemajuan yaitu 96,47%.
- c. Indikator kinerja 3 yaitu Optimalisasi PNPB sektor kehutanan pada tahun kedua Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tingkat kemajuannya 100,74% atau melebihi target tingkat kemajuan yaitu 96,47%.

Dari realisasi ketiga indikator kinerja di atas artinya pada Tahun 2017 capaian indikator kinerja pada sasaran Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan



Provinsi Sumatera Barat sudah melebihi tingkat kemajuan terhadap target kinerja akhir RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2017		Ket
		Sumbang	Riau	
Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	Sama
	Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK	82,87%	62,92%	Lebih tinggi
	Optimalisasi PNPB sektor kehutanan	85,63%	61,56%	Lebih tinggi

Dari Tabel 16 dapat dilihat, bahwa capaian kinerja masing-masing indikator diatas jika dibandingkan dengan target kinerja Provinsi Riau maka capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja Provinsi Riau. Namun secara nilai hasil hutan dan PSDH-DR Provinsi Riau lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat realisasi PSDH Provinsi Riau mencapai Rp.108.312.954.057,- sedangkan Provinsi Sumatera Barat hanya Rp.27,525,387,040.08,- hal ini disebabkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam dan hutan tanaman di Provinsi Riau lebih banyak sehingga produksi kayu Provinsi Riau lebih besar dibanding Provinsi Sumatera Barat. Namun pada sasaran ini yang diukur adalah pencapaian target hasil hutan dan optimalisasi PNPB sektor kehutanan, dan Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi pencapaian target hasil hutan dan optimalisasi PNPB sektor kehutanan dibandingkan dengan Provinsi Riau. Capaian kinerja sasaran "Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan" pada Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau dapat dijelaskan sebagai berikut:

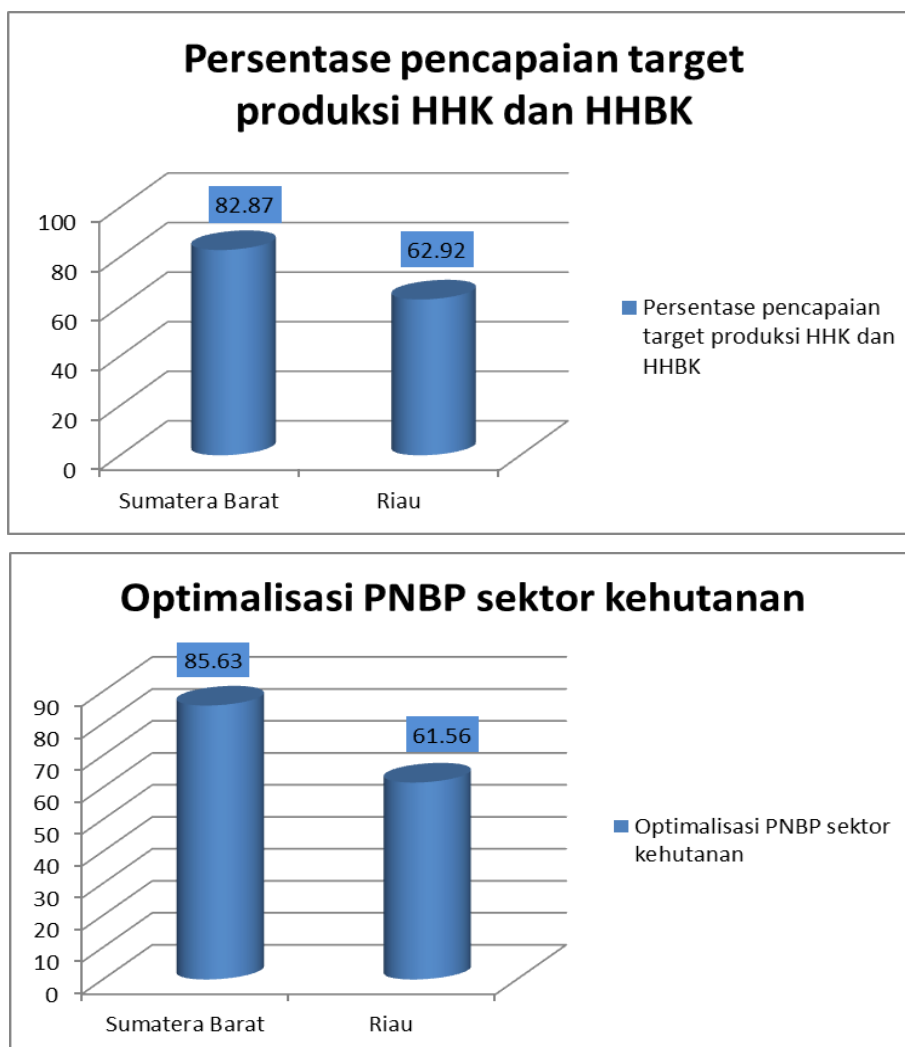
- a. Indikator kinerja 1 yaitu Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat sama dengan capaian kinerja Provinsi Riau. Artinya hutan di Provinsi Sumatera Barat dan

Provinsi Riau telah dimanfaatkan dan digunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

- b. Indikator kinerja 2 yaitu Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja Provinsi Riau. Hal ini dimungkinkan sebagai hasil upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kepada pemegang izin Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
- c. Indikator kinerja 3 yaitu Optimalisasi PNPB sektor kehutanan capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja Provinsi Riau. Dengan pembinaan dan monitoring serta evaluasi kepada pemegang izin Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera barat maka setoran PSDH-DR sebagai PNPB sektor kehutanan dapat dioptimalkan.

Perbandingan capaian kinerja sasaran Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.





Gambar 3. Perbandingan Capaian Indikator sasaran Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui dua program yang terdiri atas dua program dengan pembiayaan APBD dan satu program dengan pembiayaan APBN, program dimaksud adalah:

1. Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan (APBD) yang terdiri dari empat kegiatan masing-masing:
  - a. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan.
  - b. Kajian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
  - c. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan
  - d. Pembentukan Petak Ukur Permanen
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK yang terdiri satu kegiatan yaitu Planologi dan Tata Lingkungan

3. Program Pemanfaatan Potensi SDH yang terdiri dari tujuh kegiatan yaitu:

- a. Optimalisasi PNPB
- b. Pengembangan Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman
- c. Pengembangan Pengujian, Pengendalian dan Peredaran Hasil Hutan
- d. Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH)
- e. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu pada Wilayah Kelola KPH
- f. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
- g. Pengelolaan potensi hutan pada wilayah KPH

Secara keseluruhan kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik, hal ini bisa dilihat dari realisasi capaian target indikator sasaran melalui hasil dan capaian indikator kinerja kegiatan yang secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 17 berikut ini.

Tabel 17. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis I Tahun 2017

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	- Terpeliharanya batas kawasan hutan	70 Km	70 Km	100%	
			Kajian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	- Teridentifikasi usulan perubahan kawasan hutan dan terlaksananya kajian usulan perubahan kawasan hutan dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat	10 UTD	10 UPTD	100%	
			Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	- Terpantau dan termonitornya penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukannya	10 UTD	10 UPTD	100%	
			Pembentukan Petak Ukur Permanen	- Terbangunnya petak ukur permanen	43 petak	43 petak	100%	
		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN)	Planologi dan Tata Lingkungan	- Terlaksananya penyiapan kelembagaan pembangunan KPH	1 Lap	1 Lap	100%	
			Optimalisasi PNPB	- Laporan monitoring dan evaluasi/ pembinaan penatausahaan	3 Lap	3 Lap	100%	

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
				produksi hasil hutan, iuran Kehutanan dan penggunaan peralatan pada IUPHHK Hutan Alam				
			Pengembangan Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman	- Laporan monitoring dan evaluasi/ pembinaan penatausahaan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	3 Lap	3 Lap	100%	
			Pengembangan Pengujian, Pengendalian dan Peredaran Hasil Hutan	- Laporan monitoring dan evaluasi/ pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan Olahan, Realisasi Pemenuhan bahan baku dan pemasaran hasil hutan, produksi hutan alam dan hutan tanaman	1 Lap	1 Lap	100%	
			Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH)	- Laporan monitoring dan evaluasi/ pembinaan penatausahaan peredaran hasil hutan	10 Kel	10 Kel	100%	
			Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu pada Wilayah Kelola KPH	- Terbinanya kelompok tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan	10 Lok	10 Lok	100%	
			Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	- Tersedianya rencana areal pengembangan hasil hutan bukan kayu pada wilayah KPH	1 Lap	1 Lap	100%	
			Pengelolaan potensi hutan pada wilayah KPH	- Tersedianya data potensi wisata alam dan terbentuknya/ terbinanya kelompok kepariwisataan alam pada wilayah Kelola KPH	1 Lap	1 Lap	100%	

Uraian capaian IKU Sasaran Strategis I adalah sebagai berikut:

1. Indikator Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya" memiliki target sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator tersebut diatas dihitung dengan formula luas

pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan perizinannya pada Tahun 2017 dibagi dengan luas kawasan hutan yang dibebani izin pada Tahun 2017 dikalikan angka 100%.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Perencanaan Makro, Pemantapan Kawasan Hutan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK seperti terlihat pada Tabel 17 di atas.

Capaian Target IKU persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya Tahun 2017 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 18 berikut ini.

Tabel 18. Capaian Target IKU Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya per Triwulan Tahun 2017.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	a Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	0%	68%	100%	100%	0%	100	68%	100	100%	100	100%	100

Dari Tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut diatas setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan. Tercapainya target setiap triwulan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya dilakukan dengan baik.

Untuk mencapai target kinerja indikator "Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya" Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi terhadap unit penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan, unit pemanfaatan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri, unit pemanfaatan kawasan hutan untuk Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang sesuai dengan perizinan yang diberikan atas hak penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Pesatnya perkembangan pembangunan kegiatan non kehutanan pada kawasan hutan, pengelolaan hutan melalui IUPHHK-HA/HTI, dan pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam skema Perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat, mendorong perlunya dilakukan optimalisasi dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan Hutan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui termanfaatkannya dengan baik penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan harus dimonitor agar sesuai dengan fungsi dan peruntukannya serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur perizinan yang berlaku dalam rangka mewujudkan kepastian dalam penggunaan kawasan hutan. Pada Tahun 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 122 unit penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan seperti pada Tabel 19 di bawah ini.

Tabel 19. Hasil Monitoring Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
1.	Bupati Pasaman Barat	Pembangunan Pelabuhan Umum dan jalan Teluk Tapang – Air Bangis	122,01	HP dan HL	Sesuai
2.	PT. Gamindra Mitra Kesuma	Operasi Produksi Biji Besi dan Jalan Tambang	102,22	HPT	Sesuai
3.	LAPAN	Lokasi pengamatan Atmosfer	17,7	HPT	Sesuai
4.	Bupati Lima Puluh Kota	Pembangunan jalan menuju Transmigrasi Koto Tengah	8,37	HPK	Sesuai
5.	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Pembangunan jalan menuju lokasi Transmigrasi Padang Tarok	14,48	HPK	Sesuai
6.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok	Pembangunan jalan ruas Aie Luo – Kipek	4,40	HPT	Sesuai
7.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok	Pembangunan jalan ruas Sapan - Air Dingin	0,571	HPT	Sesuai
8.	Bupati Solok	Pembangunan jalan ruas Garabak Data-Batu Bajanjang	11,45	HL Batang Palangki	Sesuai

No	Nama Perusahaan/ Pegguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
9.	Bupati Solok	Pembangunan jalan ruas Kapujan - Rimbo Data	11,45	HL Batang Palangki	Sesuai
10.	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Padang Pariaman	Pembangunan Intake dan aringan Pipa Air Bersih	0,0575	HL Barisan I	Sesuai
11.	PT Tripabara	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	187,31	HPT	Sesuai
12.	PT Galian Endapan Buana	Pertambangan galena	153,89	HP	Sesuai
13.	Bupati Kepulauan Mentawai	Pembangunan Instalasi Listrik Biomasa	5,3	HP	Sesuai
14.	PT Semen Padang	Tambang Batu Kapur	242,3	HPT	Sesuai
15.	Walikota Padang	Pembangunan Jalan Baringin-Kalampaian	17,05	HL	Sesuai
16.	PT Allied Indo Coal Jaya	Tambang Batubara	682,39	HP Serasah	Sesuai
17.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto	Pembangunan Embung	3,65	HPK	Sesuai
18.	PT. Dasacita Pusaka Prima	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	127,31	HPK	Sesuai
19.	PT. PLN (PERSERO) PIKITRING SBS	Pembangunan PLTU	51,19	HL	Sesuai
20.	PT PLN (Persero)	SUTT dan Tapak Tower Ombilin - Kiliran Jao	18,37	HL & HP	Sesuai
21.	PT Dempo Sumber Energi	PLTM Pelangai Hulu	8,79	HPK	Sesuai
22.	PT Dempo Sumber Energi	PLTM Pelangai Hilir	21,09	HPT dan HPK	Sesuai
23.	PT Multi Energi Dinamika	PLTM Tarusan	4,5	HL	Sesuai
24.	PT PLN (Persero)	Transmisi SUTET 275 Kv GI Padang Sidempuan - GI Payakumbuh	25,78	HL dan HP	Sesuai
25.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Sumbar	Pembangunan terowongan jalan Balingka-Sianok	2,7	HL	Sesuai
26.	PT ANDALAS MERAPI TIMBER Camp Barikan - sangir Jujuhan Solse	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Alam	± 28.840	HP	Sesuai
27.	PT. SALAKI SUMMA SEJAHTERA Camp Tiniti - Siberut Barat	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Alam	± 47.605	HP	Sesuai



No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
28.	PT. MULTIKARYA LISUN PRIMA Camp Padang Tarok – Sijunjung	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Alam	± 28.885	HP	Sesuai
29.	PT. MINAS PAGAI LUMBER Camp Pulaga – Sikakap	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Alam	± 78.000	HP	Sesuai
30.	PT. BUKIT RAYA MUDISA Km. 7 Camp Muara Takung – Sjjg	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Tanaman	± 28.617	HP	Sesuai
31.	PT. DHARA SILVA LESTARI Kenagarian Bonjol – Koto Baru	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Tanaman	± 15.357	HP	Sesuai
32.	PT. INKUD AGRITAMA Kenagarian Kinali – Pasaman Barat	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Tanaman	± 5.907	HP	Sesuai
33.	PT. SUKSES JAYA WOOD Kenagarian Lunang – Silaut	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Tanaman	1.583,90	HP	Sesuai
34.	LPHN Simanau, LPHN Simancuang, LPHN Sungai Buluah, LPHN Pulakek Koto Baru, LPHN Pakan Rabaa, LPHN Pasir Talang, LPHN Koto Baru, LPHN Sirukam, LPHN Sungai Abu, Sariak Alahan Tigo LPHN Paru, LPHN Ranah Pantai Cermin, LPHN Muaro Takung, LPHN Lubuk Tarantang, LPHN Mangganti, LPHN Air Bangis, LPHN Katiagan, LPHN Sungai Betung, LPHN Aie Angek, LPHN Padang Limau Sundai. LPHN Ranah pantai Cermin, LPHN Muaro Takung, LPHN Padang limau sundai, LPHN Langki, LPHN Sisawah, LPHN Simpang Gunung Selasih, LPHN Lubuk karak, LPHN Pagadih, LPHN Padang tarok, LPHN Simarasok, LPHN	Hutan Nagari (HN)	68.873	HL,HP	Sesuai

No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
	Koto Kaciak, LPHN Lubuk Basung, LPHN Baringin, LPHN Kamang Hilir, LPHN Muaro Sei Lolo, LPHN Tanjung Betung, LPHN Sungai Rimbang, LPHN Taeh Bukik, LPHN Kubang, LPHN Taram, LPHN Kurai, LPHN Sungai balantiak, LPHN Pandam gadang, LPHN Banja laweh				
35.	HKm Maju Bersama, HKm Gunung Leco, HKm Saiyo, HKm Rap Hita Saiyo, HKm Tombang Pinang, HKm Harapan Baru, HKm Karya Setia, HKm Pangduhu Maju, HKm Sontra, HKm Beringin Sakti, HKm Bukit Lestari, HKm Wana Lestari, HKm Aur Serumpun, HKm Patamuan Saiyo, HKm Pasir Putih, HKm Sungai Tuo, HKm Leter W, HKm Sialangan, HKm Tataye Sakato, HKm Lurah Basuang, HKm Famili Sakato, HKm Talago Bawah Gunung, HKm Ingin Makmur, HKm Lurah Basuang, HKm Musus Saiyo, HKm Padang janiah, HKm Simpang Tanjuang, HKm Sungai Abu, HKm Mandiri, HKm ICU, HKm Pasada Roh, HKm Bulu Laga, HKm Rambaian, HKm Manduang, HKm Kubuak, HKm	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	19.939	HL,HP	Sesuai

No	Nama Perusahaan/ Pegguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
	Kampung Malayu, HKm Saiyo, HKm Batu Bapayuang, HKm Roba Julu, HKm Sikayan Balumuik, HKm Marguna Alam Situak				
36.	KTH Minang Saiyo, KTH Giat Bersama, KTH Mekar Jaya, KSU Air Bangis	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	6.935	Hutan Produksi	Sesuai
<b>JUMLAH</b>			332.386,23		

Dari Tabel 19 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 122 unit/perusahaan yang melakukan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 25 unit menggunakan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan, 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri, 45 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Nagari (HN), 38 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 122 unit/ perusahaan yang memanfaatkan dan menggunakan kawasan hutan tersebut diatas berdasarkan hasil evaluasi tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menggunakan dan memanfaatkan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sesuai aturan yang berlaku.

Merujuk pada hasil pelaksanaan progam dan kegiatan yang sama pada lima tahun terakhir berdasarkan target Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 secara kuantitatif pencapaian IKU Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, terlihat dalam Gambar 4.



Sumber: Hasil pengolahan data primer target IKU lima tahun terakhir

Gambar 4. Pencapaian kinerja persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya lima tahun terakhir

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa capaian IKU “Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya” setiap tahunnya tercapai dengan kategori keberhasilan sangat baik dan sesuai dengan target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Tahun 2017, dalam rangka pencapaian target IKU “Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya” telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebesar Rp. 1.546.329.925,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 1.529.307.925,- atau naik 310.70% dari anggaran tahun lalu. Hal ini dikarenakan pemenuhan pelimpahan kewenangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp. 1.305.448.050,- atau 85.73% terhadap alokasi dana perubahan. Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 217.281.425,- atau 14,27% dari dana yang tersedia. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target IKU yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan dengan kategori keberhasilan sangat baik.

2. Indikator Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK.  
Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK” memiliki target sebesar 82%, terealisasi

sebesar 82,87% dengan tingkat capaian 101,06% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator tersebut diatas dihitung dengan formula membagi realisasi produksi HHK dan HHBK Tahun 2017 dengan target produksi HHK dan HHBK dikalikan angka 100%.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Pemanfaatan Potensi SDH seperti terlihat pada Tabel 19 di atas. Capaian Target IKU Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 20 berikut ini.

Tabel 20. Capaian Target IKU Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	a Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK	25%	50%	75%	82%	29.23%	116	50.35%	100.70	60.65%	80.87	82,87%	101.60

Dari Tabel 20 diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut diatas setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan kecuali pada Triwulan III hanya terealisasi 80.87%. Hal ini disebabkan pada Triwulan III tersebut produksi hasil hutan kayu tidak banyak disebabkan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu tidak melaksanakan produksi hasil hutan sesuai target disebabkan adanya kendala di lapangan namun pada Triwulan IV pemegang izin kembali melaksanakan produksi hasil hutan sesuai target. Tercapainya target setiap triwulan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dilakukan dengan baik.

Untuk mencapai target kinerja indikator "Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK" Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pemegang izin pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sesuai dengan target produksi yang ditetapkan.

Produksi HHK dan HHBK harus dimonitor agar sesuai dengan target produksi yang ditetapkan serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur perijinan yang berlaku. Pada Tahun 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi produksi HHK dan HHBK di Provinsi Sumatera Barat dengan uraian seperti pada Tabel 21.

Tabel 21. Target dan Realisasi Produksi HHK dan HHBK di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

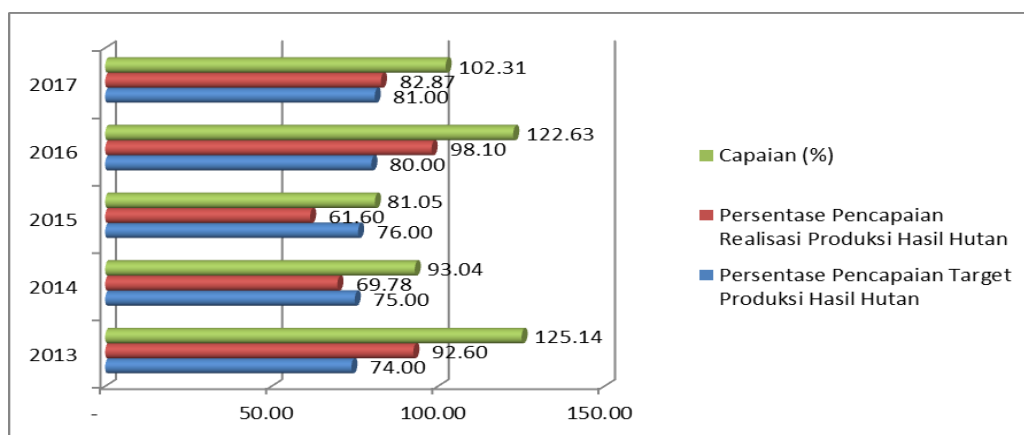
NO	KABUPATEN / KOTA	TARGET TAHUN 2017			HASIL HUTAN KAYU					HASIL HUTAN NON KAYU				
		PROD			Indah (M3)	Meranti (M3)	Campuran (M3)	KBK (M3)	Acasia (M3)	Manau (Btg)	Tabu2 (Btg)	Semambu (Btg)	G.Karet (Kg)	G. Pinus (Kg)
		HHK	ACASIA	HHBK										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kabupaten Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PT PLN	-	-	-	-	-	133.30	-	-	-	-	-	-	-
	G. Pinus	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,655.00
2	Kabupaten Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	G. Pinus	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,620.00
	Manau	-	-	15.000	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-
	Tabu-tabu	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	1,555	-	-	-
	Semambu	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-
	Rotan Lainnya	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Limapuluh Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	G. Pinus	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,427.14
4	Kabupaten Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Getah Pinus	-	-	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732,023.14
	Manau	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800	-	-	-	-
5	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hak KSU Wana Lestari	-	-	-	-	-	-	87.80	-	-	-	-	-	-
	PT SJW (Karet)	-	-	23.23	-	-	-	-	-	-	-	-	27,888.00	-
	G. Pinus	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,085.71
	Manau	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	G. Pinus	-	-	180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,541.02
8	Kabupaten Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IUPHHK-HA PT MLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kel. Meranti	35,880.42	-	-	-	8,718.33	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kel. Campuran	11,632.71	-	-	-	-	2,320.56	22.67	-	-	-	-	-	-
	KBK	201.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indah	36.66	-	-	268.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	G. Pinus	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00
9	Kabupaten Kep. Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IUPHHK-HA PT MPL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kel. Meranti	57,237.68	-	-	-	39,867.58	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kel. Campuran	927.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KBK	58.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IUPHHK-HA PT SSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kel. Meranti	93,238.01	-	-	-	53,640.06	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kel. Campuran	661.53	-	-	-	-	368.02	59.24	-	-	-	-	-	-
	KBK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IHHBK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Manau	-	-	80.000	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	-
	Tabu-tabu	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-
	Rotan	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kota Sawahlunjo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IPPKH Dinas PU Swi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	G. Pinus	-	-	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,000.00
13	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IPPKH PT Semen Padang	-	-	-	-	118.59	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kabupaten Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hak Padu Pilihan	-	-	-	10.44	49.08	429.49	-	-	-	-	-	-	-
	IUPHHK-HT PT BRM	-	1,089	-	-	-	-	-	1,269.90	-	-	-	-	-
18	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IUPHHK-HT PT BRM	-	85,599	-	-	-	-	-	7,282.33	-	-	-	-	-
	Manau	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-
19	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inkud Agrilama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Manau	-	-	10.000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-
	Tabu-tabu	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-
J U M L A H		199,874.71	86,688	-	268.62	102,393.64	3,251.37	169.71	8,552.23	189,600	21,555	5,000	27,888	1,488,852
PRODUKSI JAN S/D 24 NOVEMBER 2017 DAN TAMBAHAN 2016		-	-	-	-	-	-	-	114,635.57	189,600	21,555	5,000	27,888	1,488,852

Dari Tabel 21 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2017 realisasi produksi HHK dan HHBK terhadap target terealisasi rata-rata sebesar 82,87% dengan uraian sebagai berikut:

1. Persentase realisasi produksi kayu terhadap target: 53.07 %
2. Persentase realisasi produksi akasia terhadap target: 9.87 %
3. Persentase realisasi produksi manau terhadap target: 164.87 %
4. Persentase realisasi produksi tabu-tabu terhadap target: 53.89 %
5. Persentase realisasi produksi semambu terhadap target: 50.00 %
6. Persentase realisasi produksi getah karet terhadap target: 120.02 %
7. Persentase realisasi produksi getah pinus terhadap target: 128.35 %

Rata-rata realisasi produksi hasil hutan terhadap target adalah: 82.87 %.

Merujuk pada hasil pelaksanaan progam dan kegiatan yang sama pada lima tahun terakhir secara kuantitatif pencapaian IKU Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK, terlihat dalam Gambar 5 berikut ini.



Sumber: Hasil pengolahan data primer target IKU lima tahun terakhir  
Gambar 5. Pencapaian Target Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK lima tahun terakhir.

Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa capaian IKU "Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK" pada lima tahun terakhir melebihi target dengan kategori keberhasilan sangat baik. Tahun 2017, dalam rangka pencapaian target IKU "Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK" telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebesar Rp. 2.060.000.000,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 1.593.842.500,-

atau turun 7,7% dari anggaran tahun lalu. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp. 1.254.690.254,- atau 78,72% terhadap alokasi dana perubahan. Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 339.152.246,- atau 21,28% dari dana yang tersedia. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target IKU yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan dengan kategori keberhasilan sangat baik.

### 3. Indikator Optimalisasi PNPB Sektor Kehutanan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Optimalisasi PNPB Sektor Kehutanan" memiliki target sebesar 82%, terealisasi sebesar 85,63% dengan tingkat capaian 104,43% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator tersebut diatas dihitung dengan formula membagi realisasi penerimaan negara sektor kehutanan Tahun 2017 dengan target penerimaan negara sektor kehutanan Tahun 2017 dikalikan angka 100%.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan seperti terlihat pada Tabel 17 diatas.

Capaian Target IKU Optimalisasi PNPB sektor kehutanan Tahun 2017 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 22 berikut ini.

Tabel 22. Capaian Target IKU Optimalisasi PNPB sektor kehutanan per Triwulan Tahun 2017.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	a Optimalisasi PNPB sektor kehutanan	25%	50%	75%	82%	32,13%	128.52	53,95%	107.90	62,19%	82.92	85,63%	104.43

Dari Tabel 22 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan lebih kecuali pada Triwulan III hanya terealisasi 82,92% hal ini disebabkan pada Triwulan III tersebut produksi hasil hutan kayu tidak banyak disebabkan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu tidak melaksanakan produksi hasil hutan sesuai target. Kendala di lapangan mengakibatkan setoran



PSDH-DR juga berkurang. Namun, pada Triwulan IV pemegang izin kembali melaksanakan produksi hasil hutan sesuai target. Tercapainya target setiap triwulan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan dilakukan dengan baik. Untuk mencapai target kinerja indikator "Optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan" Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pemegang izin pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sesuai dengan target PNBP yang ditetapkan.

PNBP sektor kehutanan harus dimonitor agar sesuai dengan target PNBP yang ditetapkan serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur perizinan yang berlaku. Pada Tahun 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi PNBP sektor kehutanan di Provinsi Sumatera Barat dengan uraian seperti pada Tabel 23 di bawah ini.

Tabel 23. Target dan Realisasi PNBP Sektor Kehutanan di Sumatera Barat Tahun 2017

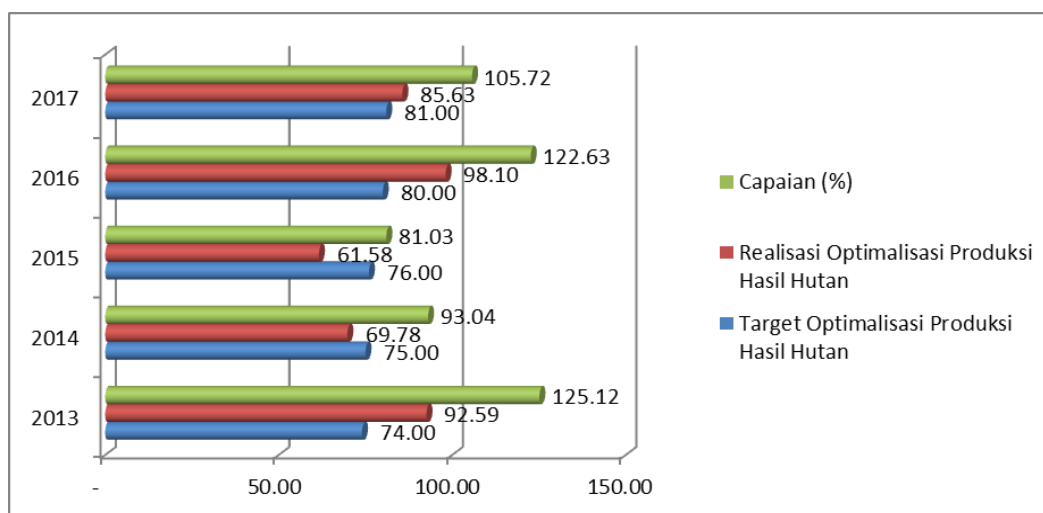
NO	KABUPATEN / KOTA	PSDH	DR	REALISASI PSDH, DR JAN 2017 S/D TAMBAHAN 2016		
		(Rp)	US \$	PSDH (Rp)	DR US \$	DR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Agam	2,520,000.00	-	-	-	-
	PT PLN	2,520,000.000	-	4,418,000.00	1,637.66	21,880,775.26
	G. Pinus	-	-	2,673,510.00	-	-
2	Kabupaten Pasaman	13,090,500.00	-	-	-	-
	G. Pinus	8,400,000.000	-	7,670,040.00	-	-
	Manau	2,700,000	-	144,000.00	-	-
	Tabu-tabu	1,200,000	-	186,600.00	-	-
	Semambu	600,000	-	300,000.00	-	-
	Rotan Lainnya	190,500.000	-	-	-	-
3	Kabupaten Limapuluh Kota	8,400,000	-	-	-	-
	G. Pinus	8,400,000.000	-	7,241,940.00	-	-
4	Kabupaten Solok	10,080,000	-	-	-	-
	Getah Pinus	10,080,000.000	-	30,744,972.00	-	-
	Manau	-	-	330,480.00	-	-
5	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Pesisir Selatan	10,809,000.00	-	-	-	-
	Hak KSU Wana Lesari	-	-	2,721,800.00	351.20	4,660,424.00
	PT SJW (Karet)	6,969,000.00	-	8,366,400.00	-	-
	G. Pinus	840,000.000	-	2,691,600.00	-	-
	Manau	1,800,000	-	-	-	-
	-	1,200,000	-	-	-	-
7	Kabupaten Tanah Datar	7,560,000	-	-	-	-
	G. Pinus	7,560,000.000	-	4,684,723.00	-	-
8	Kabupaten Sijunjung	2,701,386,010	666,379.96	-	-	-
	IUPHHK-HA PT MLP	2,700,506,010.00	-	711,622,050.00	171,689.45	2,299,425,758.57
	Kel. Meranti	2,294,637,840.00	-	-	-	-
	Kel. Campuran	394,182,900.00	-	-	-	-
	KBK	6,236,270.00	-	-	-	-
	Indah	5,499,000.00	-	-	-	-
	G. Pinus	840,000.000	-	399,000.00	-	-
9	Kabupaten Kep. Mentawai	-	-	-	-	-
	IUPHHK-HA PT MPL	3,695,065,640	841,400.00	2,548,221,740.00	576,728.27	7,731,140,450.89
	Kel. Meranti	3,663,029,200	829,901.00	-	-	-
	Kel. Campuran	30,214,260	11,264.00	-	-	-
	KBK	1,822,180	235.00	-	-	-
	IUPHHK-HA PT SSS	5,989,724,660	1,360,220.27	3,445,016,307.00	781,185.66	10,422,097,444.89
	Kel. Meranti	5,967,232,640	1,351,951.00	-	-	-
	Kel. Campuran	22,492,020	8,269.00	-	-	-
	KBK	-	-	-	-	-
	IPHHBK	15,790,500	-	-	-	-
	Manau	14,400,000	-	31,500,000.00	-	-
	Tabu-tabu	1,200,000	-	1,800,000.00	-	-
	Rotan	190,500	-	-	-	-
10	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-
11	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-
12	Kota Sawahlunt	10,080,000	-	-	-	-
	IUPHHK-HA PT SWI	-	-	1,260,801.00	548.01	7,424,987.49
	G. Pinus	10,080,000.000	-	6,426,000.00	-	-
13	Kota Solok	-	-	-	-	-
14	Kota Padang	-	-	-	-	-
	IUPHHK-HA PT Semen Padang	-	-	11,287,800.00	3,136.95	41,677,517.70
15	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-
16	Kota Pariaman	-	-	-	-	-
17	Kabupaten Dharmasraya	5,880,600.00	-	-	-	-
	Hak Padu Pilihan	5,880,600	-	20,682,180.00	7,202.89	96,899,928.28
	IUPHHK-HT PT BRM	-	-	6,857,460.00	-	-
18	Kabupaten Solok Selatan	462,234,600	-	-	-	-
	IUPHHK-HT PT BRM	462,234,600	-	39,324,582.00	-	-
	Manau	-	-	1,260,000.00	-	-
19	Kabupaten Pasaman Barat	3,000,000	-	-	-	-
	Inkud Agrilama	-	-	141,331.00	53.00	706,437.00
	Manau	1,800,000	-	900,000.00	-	-
	Tabu-tabu	1,200,000	-	600,000.00	-	-
	-	-	-	-	-	-
	J U M L A H	12,935,631,510	2,868,000.23	6,899,473,316.00	1,542,533.09	20,625,913,724.08
	PRODUKSI JAN S/D 24 NOVEMBER 2017 DAN TAMBAHAN 2016	-	-	-	-	27,525,387,040.08

Dari Tabel 23 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2017 realisasi PNBPN terhadap target terealisasi rata-rata sebesar 85,63% dengan uraian adalah sebagai berikut:

1. Persentase realisasi PNBPN kayu terhadap target: 54,40 %
2. Persentase realisasi PNBPN akasia terhadap target: 9,87 %
3. Persentase realisasi PNBPN manau terhadap target:  
164.90 %
4. Persentase realisasi PNBPN tabu-tabu terhadap target: 71,85 %
5. Persentase realisasi PNBPN semambu terhadap target: 50.00 %
6. Persentase realisasi PNBPN getah karet terhadap target:  
120.05 %
7. Persentase realisasi PNBPN getah pinus terhadap target:  
128.35 %

Rata-rata realisasi PNBPN sektor kehutanan terhadap target adalah: 85,63 %.

Merujuk pada hasil pelaksanaan progam dan kegiatan yang sama pada lima tahun berdasarkan target Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 secara kuantitatif pencapaian IKU Optimalisasi PNBPN sektor kehutanan, terlihat dalam Gambar 6 berikut ini.



Sumber: Hasil pengolahan data primer target IKU lima tahun terakhir  
Gambar 6. Pencapaian Target Optimalisasi PNBPN sektor kehutanan lima tahun terakhir

Dari Gambar 6 dapat dilihat bahwa capaian IKU "Optimalisasi PNBPN Sektor Kehutanan" pada Tahun 2017 melebihi target tahun kedua Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera dengan kategori keberhasilan sangat baik.

Tahun 2017, dalam rangka pencapaian target IKU "Optimalisasi PNBPN Sektor Kehutanan" telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebesar Rp. 75.000.000,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp 89.288.000,- atau turun 28,43% dari anggaran tahun lalu. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp 82.225.850,- atau 92,09% terhadap alokasi dana perubahan. Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 7.062.150,- atau 7,91% dari dana yang tersedia. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target IKU yaitu sebesar 85,63% dari target yang ditetapkan dengan kategori keberhasilan sangat baik.

Jika dilihat dari pencapaian terhadap target sasaran strategis sesuai yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah seperti Tabel 24 berikut ini.

Tabel 24. Pencapaian Terhadap Target Sasaran Strategis I Sesuai Yang Tertuang Pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No.	Sasaran	Indikator	REALISASI	% CAPAIAN
			2016	2016
1.	Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100
		Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK	82,87%	101,60
		Optimalisasi PNBPN sektor kehutanan	85,63%	104,43

Dari Tabel 24 di atas dapat dilihat realisasi dan capaian ketiga indikator kinerja utama untuk mengukur capaian Sasaran Strategis I pada Tahun 2017 mencapai target sesuai yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan kategori keberhasilan pencapaian target IKU sangat baik.

**Permasalahan:**

1. Belum pahamnya masyarakat terhadap aturan pemanfaatan dan pengelolaan hutan oleh masyarakat maupun oleh perusahaan;
2. Rendahnya kesadaran perusahaan untuk melakukan kewajibannya sebagai pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
3. Masih ada tumpang tindih dan non prosedural perizinan.

**Solusi:**

1. Melakukan sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan oleh masyarakat maupun oleh perusahaan;
2. Melakukan pembinaan terhadap pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
3. Melakukan identifikasi, monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan di kabupaten/kota.

**II. Meningkatnya Kemampuan Hutan dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya**

Tujuan **Meningkatnya Kemampuan Hutan dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya** dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu **Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat** dan diukur dengan tiga indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Tabel 25 berikut ini.

Tabel 25. Tujuan dan Sasaran Strategis II

<b>TUJUAN 2</b>	<b>SASARAN 2</b>
Meningkatnya Kemampuan Hutan Dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya	Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat

“Meningkatnya Kemampuan Hutan dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya” merupakan hal penting lainnya setelah produktivitas dan pengelolaan hasil hutan lestari meningkat. Tujuan ini dapat dicapai dengan meningkatkan daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam yang dijadikan sasaran strategis untuk mengukur ketercapaian tujuan 2 diatas.

Daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam dapat dicapai diantaranya dengan menurunkan luas lahan kritis dan mempertahankan kelestarian hutan melalui beberapa cara diantaranya menjaga hutan dari *illegal logging* dan kebakaran hutan yang merupakan penyebab kerusakan hutan. Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan hutan seluas  $\pm$  2.380.057 Ha dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor: SK.4/V-DAS/2015 tentang Penetapan Peta dan Data Hutan dan Lahan Kritis Nasional Tahun 2015 total lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat adalah 630.695 Ha artinya 26,50% kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat diidentifikasi mengalami penurunan daya dukung ekologi dan ekosistem (kritis).

Luas lahan kritis seluas 630.695 Ha yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini merupakan tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk menurunkan angka tersebut. Selain menurunkan luas lahan kritis, sasaran "Meningkatnya Kemampuan Hutan dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya" dicapai dengan menurunkan laju kerusakan hutan, meningkatkan persentase penurunan jumlah *hot spot* dari angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) dan menurunkan luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 26. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemampuan Hutan Dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya Tahun 2017

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	0,43 %	0,43%	100
		Persentase penurunan laju kerusakan hutan	4,15%	9,92%	239,04
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	10%	88,21	882,10
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					407,05

Dari Tabel 26 tersebut terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis II pada Tahun 2017 berhasil dicapai dengan sangat baik. Rata-rata capaian sasaran 407,05% atau turun 34,22% dari capaian tahun lalu, termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Capaian kinerja Sasaran Strategis II yang sangat tinggi bukan

dikarenakan kesalahan penetapan target kinerja. Hal ini lebih disebabkan karena dua IKU pada Sasaran Strategis II yaitu "Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan dan Persentase Penurunan Jumlah *Hot Spot* dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)" merupakan indikator yang bersifat situasional sangat tergantung pada keadaan iklim, kasus perambahan dan *illegal logging*, disamping sudah makin membaiknya sistem pengendalian kerusakan dan kebakaran hutan yang bersifat preventif sampai ke tingkat tapak (masyarakat).

Sasaran kinerja ini cenderung kualitatif mengingat beberapa indikator yang dipakai memiliki parameter yang bersifat kasuistis (situasional) dan tergantung pada faktor yang tidak dapat dikontrol oleh perencanaan.

Tabel 27. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Hutan Dan Lahan Dalam Peningkatan Fungsi Ekologis Serta Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Tahun 2016 dan Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2017	Realisasi	
			2016 (n-1)	2017 (n)
Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	0,43%	0,18%	0,43%
	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	4,15%	-	9,92%
	Persentase penurunan jumlah titik panas ( <i>hot spot</i> ) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	10%	82,88%	88,21%

Dari Tabel 27 di atas, dapat diketahui bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka ketiga indikator kinerja diatas mengalami peningkatan yang cukup baik. Dapat dijelaskan untuk indikator kinerja "Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan" tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru sebagai penyempurnaan indikator kinerja sesuai *cascading* yang telah disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Perubahan Indikator Kinerja Utama di atas dimungkinkan karena Tahun 2017 merupakan tahun pertama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dilimpahkan kewenangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dimungkinkan untuk menyusun kembali *cascading* sesuai pelimpahan kewenangan di atas. Semula Indikator Kinerja Utama (IKU) kedua Sasaran Strategis II ini adalah persentase jumlah kasus *illegal logging*

yang tertangani, setelah melakukan diskusi dengan tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta pada Bulan Oktober 2017 maka IKU tersebut disempurnakan menjadi "Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan" karena dianggap lebih menggambarkan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 28. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemampuan Hutan Dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra	Realisasi 2017	Tingkat Kemajuan (%)
Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	Persentase penurunan luas lahan kritis	2,26%	0,43%	19,03
	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	8,15%	9,92%	121,72
	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	30%	88,21%	294,03

Tabel 28 di atas memperlihatkan bahwa satu diantara tiga indikator kinerja di atas tidak memenuhi tingkat kemajuan yang baik yaitu indikator "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis". Sebaiknya tingkat kemajuan capaian indikator kinerja pada tahun kedua RPJMD atau Renstra minimal adalah 33,34% dari capaian kinerja akhir RPJMD dan Renstra karena RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat periodenya enam tahun yaitu 2016-2021, sedangkan tingkat kemajuan indikator kinerja "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" hanya 19,03%. Hal ini disebabkan penanaman Tahun 2012 luasannya lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya. Namun capaian kinerja "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" sesuai dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2017 dengan capaian 100%.

Indikator "Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan" tercapai melebihi target RPJMD dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu 9,92 % dengan tingkat kemajuan 121,72%. Namun tidak berarti capaian pada Tahun 2017 yang telah melebihi target akhir RPJMD dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengakibatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini tidak perlu

lagi dicapai pada Tahun 2018-2021 karena target akhir RPJMD dan Renstra dicapai jika pada Tahun 2018 hingga Tahun 2021 capaian IKU ini dapat dipertahankan. Artinya setiap tahun laju kerusakan kawasan hutan dapat dikendalikan dengan pelaksanaan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan, pengendalian kebakaran dan upaya preventif lainnya yang dapat memperlambat laju kerusakan hutan di Provinsi Sumatera Barat.

Sementara untuk indikator "Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hot Spot*) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)" capaian kinerja indikator ini pada Tahun 2017 sudah melebihi target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Namun jika pada tahun selanjutnya jumlah titik panas meningkat secara signifikan maka tidak menutup kemungkinan akan mengurangi pencapaian target pada akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Untuk itu capaian kinerja indikator ini setiap tahunnya harus tetap dicapai dengan baik.

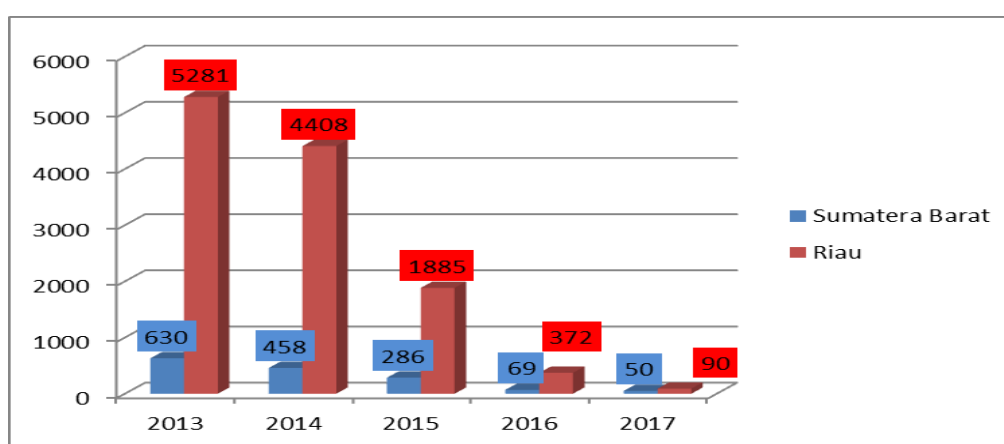
Tabel 29. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemampuan Hutan Dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Thn 2017		Ket
		Sumbar	Riau	
1	2	3		
Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	Persentase penurunan luas lahan kritis	0,43%	-	-
	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	9,92%	-	-
	Persentase penurunan jumlah titik panas ( <i>hot spot</i> ) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	82,88%	90,34%	Lebih Rendah

Dari Tabel 29 terlihat bahwa dari tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran "Terpeliharanya Ekosistem dan Kualitas Lahan" di atas ada 2 indikator yang dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Provinsi Riau yaitu indikator kinerja "Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hot Spot*) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)" dan "Persentase Jumlah Kasus *Illegal Logging* yang Tertangani". Sedangkan untuk indikator persentase penurunan lahan kritis tidak bisa dibandingkan karena ada perbedaan dalam menentukan formula penghitungan pencapaian target indikator.



Capaian kinerja terhadap indikator "Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hot Spot*) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)" Provinsi Riau lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat namun capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat telah melebihi target yang ditetapkan pada Tahun 2017. Indikator ini bersifat situasional sehingga capaian kinerja lebih banyak dipengaruhi oleh faktor alam. Capaian kinerja indikator "Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hot Spot*) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)" Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 7 berikut ini.



Gambar 7. Jumlah titik panas (*hot spot*) pada lima tahun terakhir yang terpantau melalui satelit NOAA pada Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau.

Capaian kinerja indikator "Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hot Spot*) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)" Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 8 berikut ini.



Gambar 8. Capaian kinerja indikator "Persentase penurunan jumlah titik panas (*hot spot*) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)" Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui empat program dengan pembiayaan APBD, yaitu:

1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu:
  - a. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan
  - b. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan
  - c. Konservasi Sumberdaya Genetik
2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam yang terdiri dari empat kegiatan yaitu:
  - a. Pengembangan Sarana Konservasi Tanah
  - b. Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL
  - c. Pembinaan Monitoring Pengelolaan DAS
  - d. Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Kritis di Wilayah Kelola KPH
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang terdiri dari delapan kegiatan yaitu:
  - a. Pengamanan dan Perlindungan Hutan
  - b. Pengendalian Ekowisata dan Jasa Lingkungan
  - c. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
  - d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
  - e. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
  - f. Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH
  - g. Identifikasi dan Inventarisasi serta Pengembangan Kawasan Ekosistem Essensial dan Daerah Penyangga.
  - h. Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Essensial dan Daerah Penyangga
4. Program Pengendalian Kebakaran Hutan yang terdiri dari satu kegiatan yaitu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 30.

Tabel 30. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Meningkatnya Kemampuan Hutan Dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya Tahun 2017

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
1.	Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan Indikator Sasaran: 1.Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis 2.Persentase penurunan laju kerusakan hutan 3.Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan	- Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas	200.000 batang	250.000 batang	100%	
			Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	- Tersedianya data produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembangunan hutan tanaman	13 Kab/kota	13 Kab/kota	100%	
			Konservasi Sumber Daya Genetik	- Terpeliharanya sumber daya genetik tanaman hutan	4 Lokasi	4 Lokasi	100%	
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Pengembangan Sarana Konservasi tanah	- Termonitornya bangunan KTA di Kab/Kota Prov Sumbar	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100%	
			Monitoring dan pembinaan Kegiatan RHL	- Terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/Reklamasi/DAK oleh Kab/Kota	10 Kab/kota	10 Kab/kota	100%	
			Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan DAS	- Tersusunnya rencana pengelolaan DAS	1 Dok	1 Dok	100%	
			Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Kritis di Wilayah Kelola KPH	- Tersedianya data lahan kritis di wilayah kelola KPH	1 Judul	1 Judul	100%	
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	- Terlaksananya psikotes, operasi intelijen, operasi prefresif/ pamhut, monev kasus, tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) dan koordinasi	14 laporan	14 laporan	100%	
			Pengendalian Ekowisata dan Jasa Lingkungan	- Terlaksananya identifikasi dan fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan	13 kab	13 kab	100%	
			Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	- Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana dan tersosialisasinya bahaya kerusakan hutan	1 Laporan	1 Laporan	100%	
			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	- Terlaksananya pelatihan dan Penguatan Lembaga PPHBN	2 laporan	2 laporan	100%	
			Pegendalian Dampak Perubahan Iklim	- Terlaksananya pengumpulan data PEP RAD-GRK sektor berbasis kehutanan	1 lap	1 lap	100%	

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
			Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan	- Termonitornya kondisi pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data satwa dan tumbuhan liar di kawasan hutan wilayah kelola KPH	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	
			Identifikasi dan inventarisasi serta pengembangan kawasan ekosistem essensial dan daerah	- Terbentuk dan teridentifikasinya kawasan ekosistem essensial di Provinsi Sumatera Barat	5 Lokasi	5 Lokasi	100%	
			Monitoring evaluasi dan pembinaan pengelolaan ekosistem essensial dan daerah penyangga	- Termonitornya pengelolaan kawasan ekosistem essensial di Provinsi Sumatera Barat	1 Lap	1 Lap	100%	
		Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Terlaksananya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta bimbingan teknis kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)	33 kali	33 kali	100%	

Uraian capaian IKU Sasaran Strategis II adalah sebagai berikut:

### 1. Indikator Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" memiliki target sebesar 0,43%, terealisasi sebesar 0,43% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam dan Program Dukungan Manajemen seperti terlihat pada Tabel 30 di atas.

Indikator Kinerja Utama "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" diukur dengan rumus angka 0.8 dikalikan angka jumlah tanaman

yang ditanam pada tahun 2012 (setelah dikonversikan ke luas dalam satuan hektar dibagi dengan luas lahan kritis dikalikan angka 100%. Angka 0,8 adalah asumsi tanaman yang baik pertumbuhannya 80% dari jumlah yang ditanam pada Tahun 2012. Pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis targetnya adalah 0,43%.

Capaian Target IKU persentase Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis Tahun 2016 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 31 berikut ini.

Tabel 31. Capaian Target IKU Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis per Triwulan Tahun 2016.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	a Persentase penurunan luas lahan kritis	0%	0%	0,35%	0,43%	0%	100	0%	100	0,19%	54,29	0,43%	100

Dari Tabel 31 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di atas setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan kecuali pada Triwulan III seharusnya indikator kinerja ini sudah mencapai angka realisasi 0,35 % pada Triwulan III namun hanya terealisasi sebesar 0.19% hal ini dikarenakan ada kendala teknis di lapangan. Namun capaian kinerja indikator "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" dapat direalisasikan pada Triwulan IV.

Untuk mencapai target kinerja indikator "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanaman yang dilakukan pada Tahun 2012. Hal ini sesuai dengan saran tim Kemen-PANRB yang menyarankan agar penurunan lahan kritis dilakukan dengan menghitung luasan kawasan hutan dan lahan hasil reboisasi di dalam dan di luar kawasan hutan dan lahan pada lima tahun yang lalu, mengingat lahan kritis tidak mungkin tertangani pada saat penanaman. Pohon dengan umur lima tahun dianggap telah memiliki kanopi tajuk yang cukup untuk

berkontribusi menangani pengurangan lahan kritis. Untuk itu indikator kinerja Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis Tahun 2017 dihitung dengan menghitung luasan hasil penanaman pada Tahun 2012 seperti pada Tabel 32 di bawah ini:

Tabel 32. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Penanaman Tahun 2012

No.	Lokasi	Luas (Ha)	Hasil Evaluasi		
			Jenis Tanaman	% Tumbuh	Berhasil (Ha)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Kabupaten Sijunjung</b>				
a.	HL Bk. Lantiak Purian	100	Karet dan Mahoni	81,65	100
b.	HL Mudiak Kako I	100	Karet dan Mahoni	83,00	100
c.	HL Taruko, Jr. Taruko	100	Karet	98,20	100
d.	HR. Jr. Taratak Betung	25	Karet	91.15	25
e.	HR. Jr. Sipuah	25	Karet	63.46	25
f.	HR. Jr. Batu Ajuang	50	Karet, Mahoni	65.77	50
g.	HR. Jr. Koto Mudik	5	Jabon	95.83	5
JUMLAH 1		405			405
<b>2</b>	<b>Kabupaten Solok</b>				
a.	HL. Nagari Salimpek	150	Tidak ditemukan	0	0
b.	HR Nagari Sirukam	25	Tidak ditemukan	0	0
c.	HR.Nagari Talang	25	Karet, Mahoni, Surian	77.88	25
JUMLAH 2		200			25
<b>3</b>	<b>Kab. Lima Puluh Kota</b>				
a.	HR.Paninjauan/Koto Tengah	25	Karet, Mahoni, Surian, Petai	65.96	25
b.	HR.Guntuang/Banja Loweh	25	Karet, Mahoni, Surian, Petai	73.65	25
c.	HR.Solok Dalam/Bio Bio	25	Karet, Mahoni, Surian, Petai	78.26	25
d.	HR. Jr. Bio-Bio/Bio Bio	25	Karet, Mahoni, Surian, Petai	71.34	25
e.	HR.Jorong Kaludan/Sei Talang	25	Karet, Mahoni, Surian, Petai	81.92	25
f.	HR.Tareh Sago Halaban	25	Karet, Mahoni, Surian, Petai	58.07	25
g.	HR.Lambuak Halaban	25	Karet, Mahoni, Surian, Petai	64.61	25
h.	HR.Jaringau/Suliki	25	Karet, Mahoni, Surian, Petai	65.57	25
JUMLAH 3		200			200
<b>4</b>	<b>Kab. Tanah Datar</b>				
a.	Reboisasi HL.Pamusihan	250	Karet, Mahoni, Durian, Petai, Meranti	48.17	250
b.	Hutan Rakyat Koto Alam Nagari Tabek Patah	50	Mahoni, Alpukat, Surian, Petai, Bayur dan Durian	82.66	50

No.	Lokasi	Luas (Ha)	Hasil Evaluasi		
			Jenis Tanaman	% Tumbuh	Berhasil (Ha)
1	2	3	4	5	6
c.	Tanaman KBR Penanaman Tahun 2012 di Jorong Sungai Tarab, Nagari Sungai Tarab	50	Mahoni, Alpukat, Surian dan Petai	84.06	50
d	Tanaman KBR Penanaman Tahun 2012, di Jorong Gurun, Nagari Gurun Kec. Sungai Tarab	50	Mahoni, Surian, dan Cengkeh	74.22	50
e	Tanaman KBR Penanaman Tahun 2012, di Jorong Datar, Nagari Tabek Patah Kec. Salimpaung	50	Mahoni, Surian dan Petai,	77.97	50
f	Reboisasi HL Bukik Ampalung, Jorong Sikabu, Nagari Singgalang Kec. Tj. Baru	200	Bayur, Durian, Petai, Gaharu, Manggis, Alpukat, Surian, Mahoni	46.2	0
g.	Tanaman KBR Penanaman Tahun 2012 di Jorong Nan IX, Nagari Salimpaung Kec.Salimpaung	50	Mahoni, Surian dan Petai	72.03	50
h	Tanaman KBR Penanaman Tahun 2012 di Jorong Payo Rapuih, Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah	50	Mahoni, Alpukat, Surian dan Petai	64.83	50
i	Tanaman KBR Penanaman Tahun 2012 di Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara	50	Mahoni, Alpukat, Surian dan Petai	72.03	50
j	Tanaman KBR Penanaman Tahun 2012 di Jorong Piliang, Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum	50	Mahoni, Cengkeh, Petai dan Karet,	93.91	50
JUMLAH 4		850			650
<b>5</b>	<b>Kab. Pesisir Selatan</b>				
a.	Hutan Rakyat di Kampung Kubang Nagari Kubang Koto Barapak, Kec. Bayang	100	Karet dan Surian, Pinang	40.35	100
b.	Hutan Rakyat di Nagari Sungai Lumpo	100	Karet, Mahoni, Surian, Petai	4.35	100
c	Hutan Rakyat di Nagari Punggasan Timur	100	Karet, Mahoni, Surian, Petai	90.2	100
JUMLAH 5		300			300
JUMLAH 1 s/d 5		1.955			1.580

Dari Tabel 32 terlihat bahwa penanaman yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari dana APBD dan DAK Tahun 2012 adalah seluas 1.955 Ha dan jika dengan asumsi dari penanaman tersebut tumbuh hanya 60% maka diperoleh jumlah tanaman yang tumbuh pada Tahun 2012 adalah 1.173 Ha. Pada Tahun 2017 dilakukan monitoring dan evaluasi hasil penanaman Tahun 2012 tersebut dan diperoleh dari 1.173 Ha hasil penanaman yang tumbuh pada Tahun 2012 luas hutan dan lahan yang ditumbuhi tanaman hutan hasil penanaman Tahun 2012 adalah 1.580 Ha. Jika angka 1.580 Ha dibagi dengan angka luas lahan kritis yaitu 630.695 Ha, kemudian untuk mengetahui persentasenya dikalikan dengan angka 100%, maka diperoleh angka 0,25%. Angka 0,25% ditambahkan dengan persentase penurunan lahan kritis pada Tahun 2016 sebesar 0,18% inilah yang menjadi hasil capaian indikator "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" pada Tahun 2017 yaitu sebesar 0,43%. Artinya dengan diketahui jumlah pohon yang hidup dan tumbuh baik hingga Tahun 2017, maka hasil penanaman selama lima tahun yang lalu dapat mengurangi luas lahan kritis hingga Tahun 2017. Pohon dengan usia lima tahun dianggap telah mampu melaksanakan fungsinya sebagai penyangga ekologi dan ekosistem dengan baik. Namun, pada Tahun 2017 untuk pencapaian target IKU "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebesar Rp. 3.680.000.000,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 5.961.036.000,- atau naik 20,91% dibandingkan dengan anggaran perubahan pada Tahun 2016 hal ini merupakan adanya penambahan DBH-DR sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp. 3.039.758.468,- atau 50,99% terhadap alokasi dana perubahan dan 92,93% terhadap dana diluar DBH-DR atau naik 3,04 dari realisasi tahun lalu. Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 421.277.532,- atau 12,17% dari dana perubahan diluar DBH-DR. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target IKU yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan dengan kategori keberhasilan sangat baik. Dana DBH-DR merupakan dana yang masuk pada perubahan sesuai



dengan Lampiran XI Perpres mengenai perubahan APBN Tahun 2017 bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan dana DBH-DR sebesar Rp. 14.744.646.000,- yang terdistribusi pada tiga kegiatan yaitu Kegiatan Pembuatan Bibit Tanaman Hutan sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebesar Rp. 6.944.646.000,- dan Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan sebesar Rp. 5.300.000.000,-. Dana DBH-DR ini tidak kami gunakan mengingat belum adanya pedoman umum, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis terhadap penggunaan dana DBH-DR tersebut.

## **2. Indikator Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan**

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan" memiliki target sebesar 4,15%, terealisasi sebesar 9,92% dengan tingkat capaian 239,04% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Program Pengendalian Kebakaran Hutan seperti terlihat pada Tabel 30 diatas.

Indikator Kinerja Utama "Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan" diukur dengan menghitung perubahan penutupan lahan kawasan hutan pada Tahun 2016 dikurangi dengan perubahan penutupan lahan kawasan hutan pada Tahun 2017 kemudian hasilnya dibagi dengan perubahan penutupan lahan Tahun 2016 dikalikan dengan angka 100%. Pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Persentase penurunan laju kerusakan hutan pada Tahun 2017 targetnya adalah 4,15%.

Capaian Target IKU Persentase penurunan laju kerusakan hutan Tahun 2017 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti yang terdapat pada Tabel 33.

Tabel 33. Capaian Target IKU Persentase penurunan laju kerusakan hutan per Triwulan Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	b. Persentase penurunan laju kerusakan hutan	0%	0%	0%	0%	0%	100	0%	100	0%	100	100%	100

Dari Tabel 33 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian target indikator “Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan” merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan seperti patroli simpatik pengamanan hutan, penyusunan perda pengamanan dan perlindungan hutan, penyidikan dan pengamanan hutan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan perlindungan hutan melalui kerangka PPHBN (Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Masyarakat).

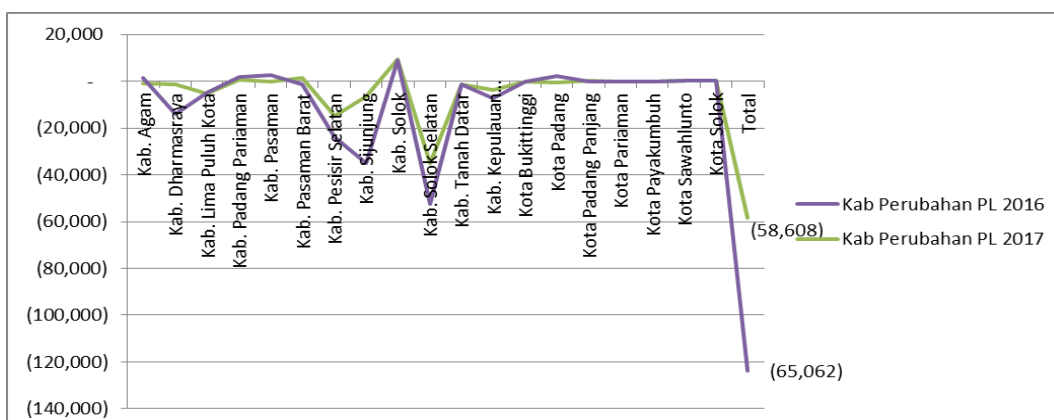
Berdasarkan rekapitulasi data tutupan lahan Tahun 2015 hingga Tahun 2017, secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 34 berikut ini.

Tabel 34. Tutupan Lahan Kawasan Hutan Tahun 2015 hingga Tahun 2017

No	Kab	Perubahan Tutupan Hutan			
		PL_Hutan 2015	PL_Hutan 2016	PL_Hutan 2017	Perubahan (Selisih)
1	Kab. Agam	56,114	56,314	55,466	(848)
2	Kab. Dharmasraya	62,227	59,300	57,988	(1,312)
3	Kab. Lima Puluh Kota	115,939	120,418	114,936	(5,482)
4	Kab. Padang Pariaman	24,898	25,361	25,810	449
5	Kab. Pasaman	223,507	219,868	219,762	(106)
6	Kab. Pasaman Barat	75,888	73,120	74,427	1,307
7	Kab. Pesisir Selatan	311,416	313,911	299,127	(14,784)
8	Kab. Sijunjung	130,686	131,262	124,884	(6,378)
9	Kab. Solok	201,211	171,506	180,676	9,170
10	Kab. Solok Selatan	172,381	203,598	168,407	(35,191)
11	Kab. Tanah Datar	42,249	42,716	41,214	(1,502)
12	Kab. Kepulauan Mentawai	467,243	466,882	463,094	(3,788)
13	Kota Bukittinggi		-	-	-
14	Kota Padang	34,995	34,061	33,394	(667)

No	Kab	Perubahan Tutupan Hutan			
		PL_Hutan 2015	PL_Hutan 2016	PL_Hutan 2017	Perubahan (Selisih)
15	Kota Padang Panjang	1,024	354	705	351
16	Kota Pariaman		-	-	-
17	Kota Payakumbuh	199	198	199	1
18	Kota Sawahlunto	2,453	2,190	2,319	129
19	Kota Solok	1,269	1,087	1,128	41
	Total	1,923,700	1,922,146	1,863,538	(58,608)

Dari Tabel 34 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2017 tetap terjadi kerusakan hutan sebesar 58.608 Ha. Namun, jika dibandingkan dengan kerusakan hutan Tahun 2016 sebesar 65.062 Ha laju kerusakan hutan menurun sebanyak 9,92%. Jika dilihat dari perubahan tutupan lahannya yang banyak mengalami perubahan tutupan lahan dari hutan sekunder, hutan primer menjadi semak belukar, areal pertanian/perkebunan dan areal terbuka adalah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dimungkinkan karena pada Kabupaten Solok Selatan terjadi perubahan batas administrasi kabupaten yang menyebabkan sebagian besar kawasan hutannya masuk ke wilayah Kabupaten Solok, perubahan tutupan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan adanya perambahan dan perladangan masyarakat. Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan adanya perubahan penggunaan kawasan untuk areal budidaya pertanian/perkebunan masyarakat. Laju penurunan kerusakan kawasan hutan di Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 9 berikut ini.



Gambar 9. Perkembangan Perubahan Penutupan Lahan Kawasan Hutan di Sumatera Barat Dua Tahun Terakhir

Dari Gambar 9 di atas diketahui bahwa perubahan penutupan lahan kawasan hutan pada Tahun 2017 mengalami penurunan yaitu dari angka (65.062) Ha pada Tahun 2016 menjadi (58.608) Ha pada Tahun 2017. Artinya pada Tahun 2017 jumlah lahan kawasan hutan yang terbuka/ berubah menjadi semak belukar, areal perladangan/perkebunan berkurang dibandingkan dengan Tahun 2016. Sehingga laju kerusakan hutan dikatakan menurun dari tahun sebelumnya. Nilai minus mengartikan penutupan lahan kawasan hutan berubah menjadi semak belukar, areal perladangan atau perkebunan. Indikator kinerja Persentase penurunan laju kerusakan hutan capaiannya melebihi target yaitu 239,04% karena dari kerusakan hutan 65.062 Ha pada Tahun 2016 menjadi 58.609 Ha pada Tahun 2017.

Menurunnya laju kerusakan hutan pada Tahun 2017 merupakan hasil positif sebagai upaya untuk menekan kerusakan hutan akibat dari penebangan hutan ilegal, dan perambahan. Untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditentukan dalam sasaran ini, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya diantaranya yang paling efektif adalah pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pengamanan dan perlindungan hutan. Melalui Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2017 telah berhasil membentuk 159 kelompok PPHBN yang tersebar di 159 Nagari yang terdiri dari 620 personil satgas seperti pada Tabel 35 berikut ini.

Tabel 35. Jumlah Kelompok Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari hingga Tahun 2017 di Sumatera Barat

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH NAGARI	JUMLAH ANGGOTA PPHBN (Org)
1.	SOLOK SELATAN	23	30
2.	SOLOK	20	80
3.	KEP. MENTAWAI	8	32
4.	PADANG PARIAMAN	9	31
5.	50 KOTA	9	20
6.	AGAM	6	38
7.	PESISIR SELATAN	12	45
8.	SIJUNJUNG	7	35
9.	PASAMAN	33	173
10.	TANAH DATAR	6	37

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH NAGARI	JUMLAH ANGGOTA PPHBN (Org)
11.	PASAMAN BARAT	5	22
12.	SAWAHLUNTO	18	57
13	DHARMASRAYA	1	10
14	KOTA SOLOK	2	10
	<b>JUMLAH</b>	<b>159</b>	<b>620</b>

Tahun 2017, dalam rangka pencapaian target IKU Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebesar Rp. 5.316.241.064,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 10.588.806.064,-, pada anggaran perubahan termasuk dana DBH-DR sebesar Rp. 5.300.000.000,- yang tidak direalisasikan karena belum ada pedoman umum, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dari penggunaan dana DBH-DR tersebut sehingga jika dikeluarkan dana DBH-DR maka anggaran untuk IKU diatas adalah Rp. 5.288.806.064,- atau naik sebesar Rp. 4.320.803.064 (446%) dari anggaran Tahun 2016. Kenaikan yang signifikan merupakan pemenuhan kewenangan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp. 3.788.509.698,- atau 35,78% terhadap alokasi dana perubahan dan 71,63% terhadap dana perubahan diluar DBH-DR. Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.500.296.366,- atau 28,37% dari dana perubahan yang tersedia. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target IKU yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan dengan kategori keberhasilan sangat baik. Namun dapat dijelaskan tidak optimalnya penyerapan dana pada IKU di atas disebabkan beberapa hal diantaranya adalah kurangnya tindak pidana bidang kehutanan pada Tahun 2017 sehingga pelaksanaan kegiatan operasi/penindakan (represif) tidak terealisasi.

### **3. Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (Hot Spot) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) " Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hot Spot*) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya

(2011-2015) memiliki target sebesar 10%, terealisasi sebesar 88,21% dengan tingkat capaian 882,10% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Pengendalian Kebakaran Hutan seperti terlihat pada Tabel 30 diatas.

Indikator Kinerja Utama " Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hot Spot*) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)" diukur dengan menghitung (penurunan titik panas (*hot spot*) di Tahun 2017 dibagi jumlah rerata titik panas (*hot spot*) pada periode lima tahun sebelumnya (2011-2015) dikalikan angka 100%. Pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Persentase penurunan jumlah titik panas (*hot spot*) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) pada Tahun 2017 targetnya adalah 10%. Capaian Target IKU Persentase penurunan jumlah titik panas (*hot spot*) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) Tahun 2017 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 36 berikut ini.

Tabel 36. Capaian Target IKU Persentase penurunan jumlah titik panas (*hot spot*) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) Tahun 2017 setiap triwulannya

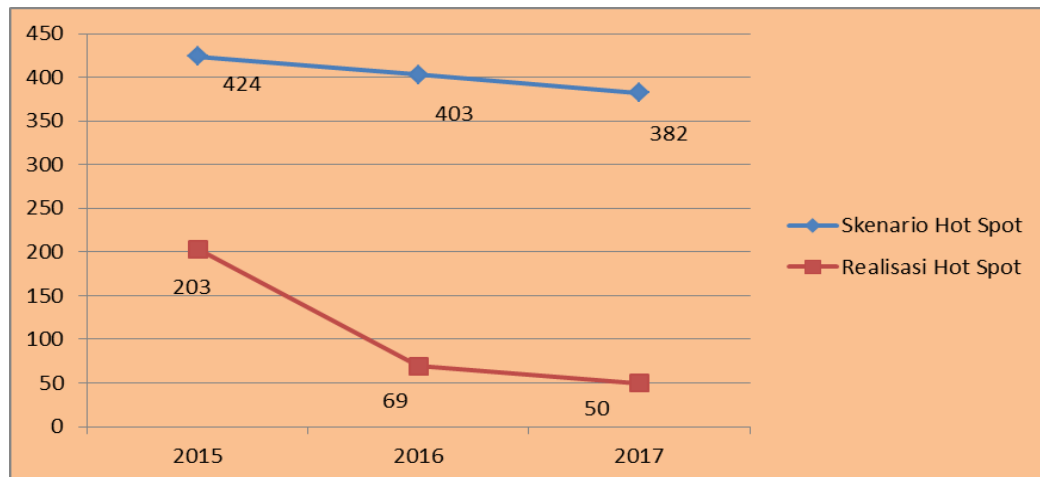
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	a Persentase penurunan jumlah titik panas ( <i>hot spot</i> ) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	2,5%	5%	7,5%	10%	97,17%	3.887	94,57%	1891	90,09%	1.201	88,21%	882,1

Dari Tabel 36 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di atas setiap triwulannya dapat dicapai melebihi target triwulan yang ditetapkan. Pada Tahun 2017 tidak terjadi kebakaran hutan maupun lahan dalam skala yang besar, upaya pengawasan dan pencegahan dini yang optimal dilakukan oleh Satuan Tugas Pemadam Kebakaran hutan dan Lahan (SATGAS DAMKARHUTLA) maupun pemantauan melalui satelit NOAA dalam mendeteksi titik api yang terjadi dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan kontribusi yang maksimal dalam pencapaian target

indikator sasaran ini. Pengaruh iklim dan curah hujan sangat mempengaruhi capaian indikator kinerja ini.

Koordinasi yang dilakukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor kehutanan menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota senantiasa menyiapkan diri dalam mengantisipasi terjadinya hal tersebut baik dalam upaya pencegahan maupun pengendalian kebakaran hutan dan lahan walaupun dengan segala keterbatasan Sumber Daya Manusia maupun Sarana dan Prasarana yang ada.

Hasil Pantauan *hot spot* di Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan sangat terpengaruh dengan kondisi musim/iklim yang erat kaitanya dengan Isu Pemanasan Global yang mendorong adanya wacana dalam perdagangan karbon (*Carbon Trade*). Skenario penurunan *hot spot* dimulai dengan angka 424, angka ini merupakan angka rerata *hotspot* Tahun 2011-2015. Selanjutnya sesuai target indikator sasaran yaitu penurunan titik panas (*hot spot*) sebanyak 10% dari angka tahun sebelumnya maka diperoleh angka toleransi titik panas (*hot spot*) untuk Tahun 2017 dalam bentuk skenario *hot spot* seperti Gambar 10 berikut ini.



Gambar 10. Angka *Toleransi* Titik Panas (*Hot Spot*) dan Realisasi *Hot Spot* Tahun 2015-2017

Dari Gambar 10 di atas dapat dilihat pada Tahun 2017 titik api mengalami penurunan dari 203 titik api di Tahun 2015 menjadi 69 titik api di Tahun 2016 dan menjadi 50 titik api di Tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh faktor iklim dan cuaca yang terjadi sepanjang

Tahun 2016 disamping usaha-usaha pencegahan dan deteksi dini seperti pemasangan larangan pembakaran hutan, lahan dan kebijakan pembukaan kebun tanpa bakar. Dari periode lima tahun yaitu dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 rata-rata jumlah titik panas (*hot spot*) yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat adalah 424 titik api. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hot Spot*) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) adalah menurunkan jumlah titik api sebanyak 10% dari rerata jumlah titik api pada periode Tahun 2011-2015 (424 titik api) tersebut. Berdasarkan skenario penurunan titik api yang terlihat pada Gambar 7. penurunan titik api sebanyak 10% dicapai jika jumlah titik api pada Tahun 2017 adalah 382 titik api, namun ternyata pada Tahun 2017 titik api berhasil diturunkan hingga 88,21% atau 50 titik api.

Jumlah titik api berdasarkan satelit NOAA yang berhasil dipantau oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 37 berikut ini.

Tabel 37. Jumlah Hot Spot (Titik Api) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 berdasarkan Pantauan Satelit NOAA

NO	KABUPATEN/ KOTA	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	
	<b>KABUPATEN :</b>													
1	AGAM													0
2	DHARMASRAYA	3				1	2	1			1		1	9
3	KEP. MENTAWAI							1						1
4	LIMA PULUH KOTA						2	6			2			10
5	PARIAMAN													0
6	PASAMAN										1			1
7	PASAMAN BARAT						1	1			1			3
8	PESISIR SELATAN	2	1			2	2	6			1			14
9	SIJUNJUNG	2	1					1					1	5
10	SOLOK									1				1
11	SOLOK SELATAN	3					1			2				6
12	TANAH DATAR													0
														0
	<b>KOTA ;</b>													0
13	BUKITTINGGI													0
14	PADANG													0
15	PADANG PANJANG													0
16	PAARIAMAN													0
17	PAYAKUMBUH													0
18	SAWAHLUNTO													0
19	SOLOK													0
	JUMLAH	10	2	0	0	3	8	16	0	3	6	0	2	50
	JUMLAH KUMULATIF		12	12	12	15	23	39	39	42	48	48	50	

Dari Tabel 37 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten dengan jumlah *hot spot* tertinggi. Umumnya



lokasi terjadinya titik api berada pada lahan diluar kawasan hutan dan ada beberapa titik yang berada dalam kawasan hutan. Titik api yang terjadi diluar kawasan hutan merupakan akibat masyarakat yang melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan dengan cara membakar hutan. Pembukaan lahan (*Land Clearing*) dengan cara membakar hutan masih menjadi primadona untuk pembukaan lahan tanpa memerlukan biaya tinggi.

Jika dilihat perkembangan *hot spot* per bulan, pada saat musim penghujan jumlah *hot spot* relatif rendah, hal ini dapat dilihat mulai bulan september hingga desember titik panas (*hot spot*) mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jumlah hotspot mengalami peningkatan pada musim kemarau pada puncaknya yaitu pada bulan Juli. Dengan melihat data tersebut di atas maka kesiapsiagaan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan titik panas (*hot spot*) pada tahun yang akan datang jika trend musim kemarau sama dengan Tahun 2017 sudah harus dimulai pada awal tahun dan harus lebih intensif pada bulan-bulan di musim kemarau.

Pemantauan titik panas (*hot spot*) merupakan upaya awal untuk mendeteksi kebakaran hutan secara dini. Luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada Tahun 2017 seluas 147,5 Ha atau turun 77,68% dari luas kebakaran tahun lalu seperti dapat dilihat pada Tabel 38 berikut ini.

Tabel 38. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Barat Tahun 2017

NO	LOKASI				LUAS HA	FUNGSI KAWASAN
	Lokasi	NAGARI	KECAMATAN	KABUPATEN		
1	Ujung Gading	Ujung Gading	Lembah Melintang	Pasaman Barat	20	APL
2	Bukit Teletabis	Lb. Layang	Rao selatan	Pasaman	10	HL
3	Kapalo Koto	Padang Sibusuk	Kupitan	Sijunjung	3	APL
4	Bukit Pincuran Tujuh	Galugur	Kapur IX	50 Kota	64	APL
5	Pulau Panjang	Tg. Pauh	Pangkalan	50 Kota	35	APL
6	Bukit Ngawasah	Tg. Balit	Pangkalan	50 Kota	9	APL - HL
7	Ujung Gading	Ujung Gading	Lembah Melintang	Pasaman Barat	2	APL
8	Ladang Padi	Indarung	Lubuk Kilangan	Kota Padang	1.5	HL
9	Ladang Padi	Indarung	Lubuk Kilangan	Kota Padang	3	HL
JUMLAH					147.5	

Tahun 2017, dalam rangka pencapaian target IKU "Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hot Spot*) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)" telah dialokasikan dana

pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebesar Rp. 1.426.000.000,-253.170.000,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 8.370.646.000,- atau naik sebesar 3.206%. Kenaikan anggaran untuk IKU di atas disebabkan adanya tambahan dana DBH-DR sebesar Rp. 6.944.646.000,- namun jika dihitung diluar DBH-DR maka anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja IKU diatas bertambah sebesar Rp. 1.172.830.000,- atau naik 463,26% dibanding anggaran tahun lalu hal ini disebabkan adanya pelimpahan kewenangan sesuai Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp. 1.055.266.250,- atau 12,61% terhadap alokasi dana perubahan dan 74,00 % terhadap dana anggaran perubahan diluar DBH-DR.

Efisiensi anggaran tersebut di atas adalah dari perjalanan dinas dalam rangka pemadaman kebakaran hutan yang tidak direalisasikan karena jumlah kebakaran hutan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017 tidak banyak. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target IKU yaitu sebesar 882,10% dari target yang ditetapkan dengan kategori keberhasilan sangat baik.

Tahun 2017, dalam rangka pencapaian target IKU Sasaran Strategis Meningkatnya Kemampuan Hutan dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebesar Rp. 10.422.241.064,-6.635.713.300,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 24.920.488.064,- atau naik 275,55% dari anggaran tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada anggaran perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mendapat tambahan Dana Bagi Hasil- Dana Reboisasi (DBH-DR) sebesar Rp. 14.744.646.000,- yang tidak dilaksanakan dikarenakan belum adanya pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dari penggunaan dana DBH-DR tersebut. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target ketiga IKU pada sasaran strategis II ini adalah sebesar Rp. 7.883.534.416,- atau 31,63% terhadap alokasi dana perubahan dan 77,47%90,19% terhadap

dana perubahan diluar DBH-DR atau turun 14,10% dari realisasi anggaran pada tahun yang lalu. Artinya terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.292.307.648,- atau 22,53% dari anggaran perubahan diluar DBH-DR. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target sasaran strategis meningkatnya kemampuan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsinya yaitu sebesar 407,05% dari target yang ditetapkan dengan predikat pencapaian sangat baik

**Permasalahan :**

1. Belum definitifnya KPH sebagai UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat cukup mempengaruhi serapan anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjadi semakin sulit dengan belum terdistribusinya Sumber Daya Manusia (SDM) pada KPH sesuai dengan analisa kebutuhan SDM pada masing-masing KPH sehingga serapan anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjadi sangat rendah.
2. Tenaga pengamanan hutan, terutama PPNS, sangat terbatas dan saat ini menjabat sebagai pejabat struktural sehingga tidak bisa menangani kasus secara *intens*.
3. Lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran dibidang kebakaran hutan dan lahan.
4. *Hot spot* banyak terdapat di luar kawasan hutan akan tetapi upaya instansi terkait di daerah dalam pengendalian kebakaran lahan masih kurang.
5. MPA dan kelompok tani belum dilengkapi dengan sarpras pemadaman kebakaran.

**Solusi:**

1. Melakukan percepatan pembentukan UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
3. Menambah jumlah PPNS.
4. Peningkatan peran dan kerjasama dalam peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan seperti: apel siaga, kampanye, dan lain-lain.

5. Melengkapi MPA dan kelompok tani pengamanan swadaya dengan sarpras pemadam kebakaran.

### III. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan

Tujuan **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan** dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu **Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat** dan diukur dengan tiga indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Tabel 39 berikut ini.

Tabel 39 Tujuan dan Sasaran Strategis III.

<b>TUJUAN 3</b>	<b>SASARAN 3</b>
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat

Tujuan “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan” merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan yang selama ini belum memiliki akses terhadap sumberdaya alam terutama kawasan hutan. Implementasi Pengelolaan Hutan Berbasis masyarakat atau Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat memberikan pengakuan sosial yang luar biasa, pengakuan status hukum bagi masyarakat, memberikan kejelasan dalam pengelolaan kawasan hutan serta meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik tenurial dan adat.

Tujuan ini dapat dicapai dengan memberdayakan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat untuk mengukur ketercapaian Tujuan 3 diatas. Pencapaian kinerja sasaran “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat” Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 40 berikut ini.

Tabel 40. Pencapaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat Tahun 2017

<b>No</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
1.	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	8,5%	15,39%	181,06
<b>Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)</b>					<b>181,06</b>

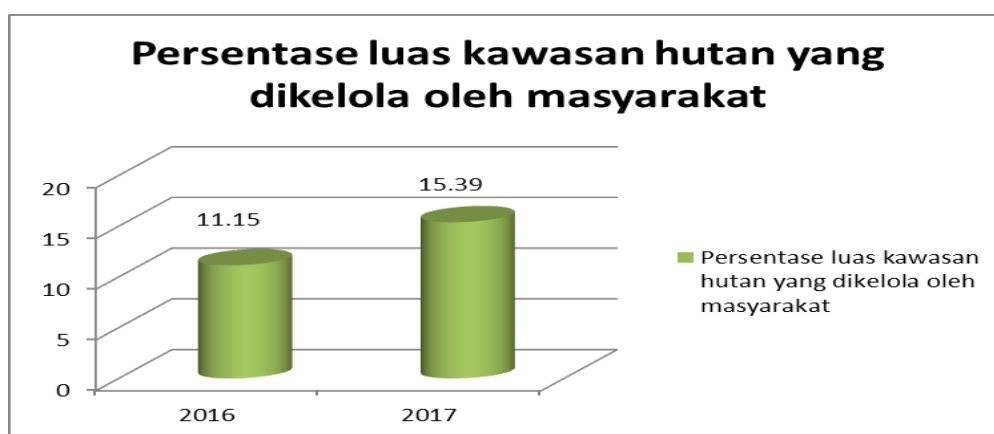
Dari Tabel 40 di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis III pada Tahun 2017 berhasil dicapai dengan baik. Rata-rata capaian sasaran 181,06% termasuk kategori keberhasilan

sangat baik. Arti capaian 181,06% di atas adalah luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat melalui pola HTR, Hm dan HN pada Tahun 2017 telah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 41. Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pengelolaan Hutan Melalui Pola HTR, HN dan HKm Tahun 2016 dan Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2017	Realisasi	
			2016 (n-1)	2017 (n)
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	8,5%	11,15%	15,39%

Dari Tabel 41 dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja "Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat" Tahun 2017 meningkat 4,24% dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2016. Jika dilihat dalam bentuk grafik maka gambar 11 berikut memperlihatkan capaian kinerja indikator kinerja tersebut di atas.



Gambar 11. Capaian kinerja untuk indikator kinerja "Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat" Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Tabel 42. Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pengelolaan Hutan Melalui Pola HTR, HN dan HKm s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	21,21%	15,39%	72,56

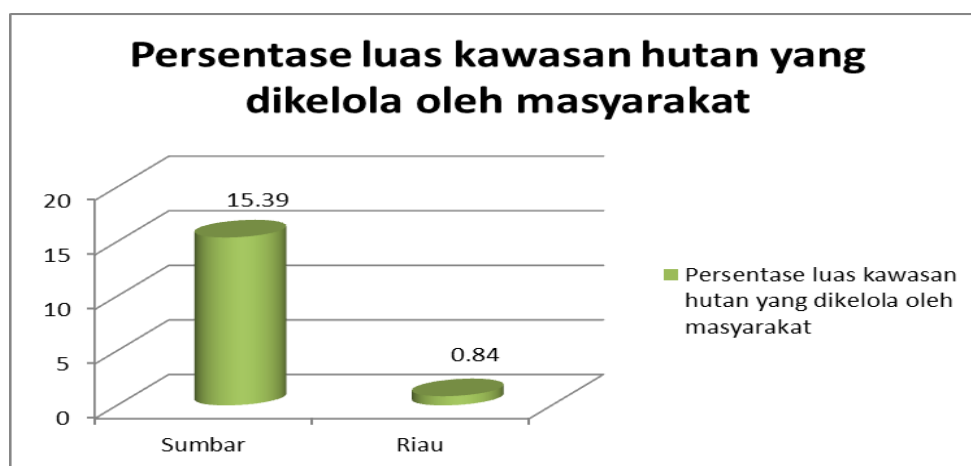
Tabel 42 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat diatas pada Tahun 2017 telah mendukung capaian indikator kinerja target akhir RPJMD dan atau Renstra yaitu sebesar 72,56%. Memperhatikan tingkat kemajuan hasil capaian maka diperkirakan sasaran "Peran Serta

Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan” pada target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan dapat dicapai.

Tabel 43. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Provinsi Sumatera Barat Dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Thn 2017		Ket
		Sumbar	Riau	
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	15,39%	0,84%	Lebih Tinggi

Dari Tabel 43 dapat dilihat, capaian indikator tersebut di atas Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau. Angka realisasi capaian indikator sebesar 15,39% memiliki arti bahwa 15,39 % dari luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang ada di Provinsi Sumatera Barat telah dapat diakses/dikelola oleh masyarakat sesuai skema perhutanan sosial. Sedangkan Provinsi Riau baru 0,84% dari luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola oleh masyarakat dalam skema perhutanan sosial. Dengan demikian Provinsi Sumatera Barat sedikit lebih baik dalam pelaksanaan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat dibandingkan Provinsi Riau. Ini merupakan hasil kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh *stake holders* terkait sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan. Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Sumatera Barat Dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau Tahun 2017 juga dapat disajikan dalam bentuk grafik seperti Gambar 12 berikut ini:



Gambar 12. Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Sumatera Barat Dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau Tahun 2017

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui dua program yang terdiri atas satu program dengan pembiayaan APBD dan satu program dengan pembiayaan APBN, program dimaksud adalah:

1. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan (APBD) yang terdiri dari enam kegiatan yaitu:
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan
  - b. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan
  - c. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan
  - d. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan dan Penguatan Kelembagaan Tani Hutan
  - e. Penguatan Forum Komunikasi PHBM Sumatera Barat
  - f. Pengembangan Hutan Mangrove
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK Kegiatan Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Komponen Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan dua sub komponen yaitu:
  - a. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan
  - b. Peningkatan Kelompok Tani Hutan dari Pemula menjadi Madya
3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu:
  - a. Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan
  - b. Implementasi ISO Pelayanan dan SPIP

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 44 berikut ini.

Tabel 44. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis III Tahun 2017

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
1.	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Indikator Sasaran: Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan	- Terlaksananya Musrenbanghutd, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota	2 Lap	2 Lap	100%	

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan	- Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan	120 Orang	120 Org	100%	
			Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan	- Meningkatnya kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan (HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan)	20 Kel	20 Kel	100%	
			Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	- Terjalinnnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan)	100 Org	100 Org	100%	
			Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan dan Penguatan Kelembagaan Tani Hutan	- Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di Sumatera Barat	94 Org	94 Org	100%	
			Pengembangan Hutan Mangrove	- Peningkatan SDM masyarakat dalam mengelola hutan mangrove	30 Org	30 Org	100%	
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Terlaksananya BOP kehutanan	1 Lap	1 Lap	100%	
				- Terlaksananya Peningkatan Kelompok Tani Hutan dari Pemula menjadi Madya	1 Lap	1 Lap	100%	

Uraian capaian IKU sasaran strategis "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan" adalah sebagai berikut:

### 1. Indikator Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat" memiliki target sebesar 8,5%, terealisasi sebesar 15,39% dengan tingkat capaian 181,06% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK dan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup seperti terlihat pada Tabel 44 di atas.

Indikator Kinerja Utama "Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat" diukur dengan luas kawasan hutan yang diusulkan hingga tahap verifikasi untuk dapat dikelola oleh



masyarakat/kemitraan pada tahun N dibagi jumlah luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi dikalikan angka 100%.

Capaian Target IKU "Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat" Tahun 2017 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 45 berikut ini.

Tabel 45. Capaian Target IKU Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat Per Triwulan Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	a. Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat	12%	48%	84%	100%	36%	300	98%	204	113%	135	134%	134

Dari Tabel 45 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di atas setiap triwulannya dapat dicapai melebihi target triwulan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm dilakukan dengan baik.

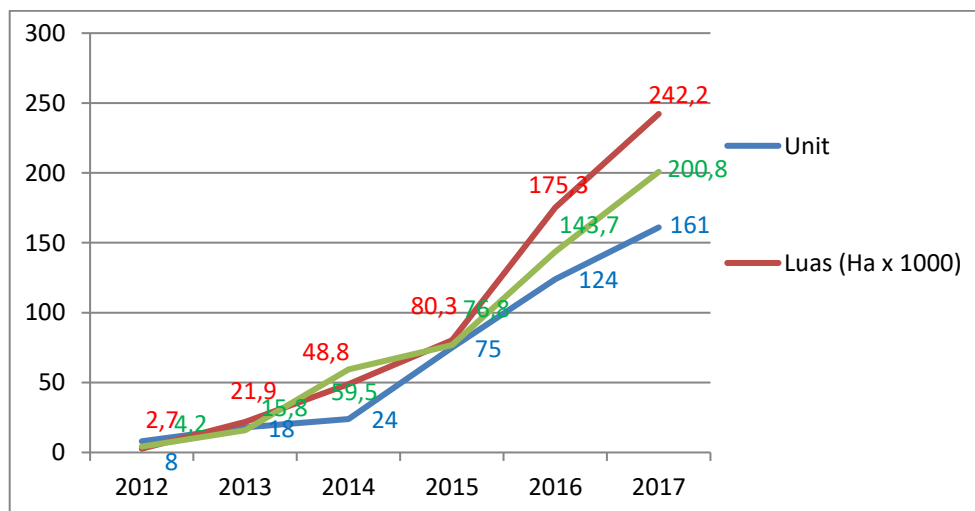
Untuk mencapai target kinerja indikator Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan, Penguatan Forum PHBM Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Kelembagaan, Pengendalian PHBM.

Capaian Kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses perizinan mulai dari Usulan, Proses verifikasi, Penetapan Areal Kerja dan Hak Pengelolaan Hutan Nagari/Izin Pemanfaatan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat/Perhutanan Sosial yang meliputi skema Hutan Nagari, Hutan kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat di luar Hutan Rakyat yang berada pada hutan hak yang secara kumulatif hingga pada Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 46.

Tabel 46. Rekapitulasi Luas Areal Kelola Perhutanan Sosial

No	SKEMA	PROGRES								Total
		Usulan		Verifikasi		PAK*			HPHD/ IUPH	
		Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	
1	Hutan Nagar	32	63.849	29	55.983	4	6.110	38	62.763	103/188.705
2	Hutan Kemasyarakatan	2	1.650	9	11.645	8	5.615	30	14.324	49/33.234
3	Hutan Tanaman Rakyat	0	0	2	800	1	4.818	3	2.117	6/7.735
4	Kemitraan Kehutanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0/ 0
5	Hutan Adat**	3	12.500	0	0	0	0	0	0	3/12.500
	TOTAL***	37	77.999	40	68.428	13	16.543	71	79.204	161/ 242.174

Dari Tabel 46 diatas terlihat untuk skema Hutan Adat masih dalam proses mendorong usulan ditingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Merunut progresnya dalam kurun waktu enam tahun terakhir perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dalam Gambar 13 berikut ini.



Gambar 13. Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Enam Tahun Terakhir

Dari Gambar 13 di atas menggambarkan perkembangan perhutanan sosial di seluruh tahapan proses baik usulan, verifikasi, PAK dan Hak Pengelolaan/Izin pemanfaatan secara kumulatif dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, perkembangan menggembirakan pada komponen luas areal kelola dan penerima manfaat dari pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat. Dua komponen ini erat kaitannya dengan skema perhutanan sosial yang ada, peningkatan unit hutan nagari akan berkorelasi lurus dengan Luas areal kelola dan penerima manfaat mengingat batasan luasan untuk skema hutan nagari bisa seluruh kawasan hutan lindung dan produksi di

wilayah administrasi nagarinya disamping personal/masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan hutan nagari akan lebih terbuka dibanding dengan skema HKm dan HTR yang memang terbatas pada jumlah anggota kelompok masing-masing HKm atau HTR. Peningkatan perkembangan yang nyata di tiga tahun terakhir merupakan hasil kontribusi dari berbagai pihak terkait yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Faktor lain yang mendukung percepatan perluasan dan pengembangan Perhutanan sosial di Tahun 2017 adalah dukungan dari berbagai lembaga dan LSM yang memungkinkan sekretariat Kelompok Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat mendorong percepatan fasilitasi usulan perhutanan sosial melalui penyelenggaraan monitoring dan evaluasi progres fasilitasi usulan, workshop fasilitasi usulan, rakor pokja, pengembangan usaha, pelatihan dan sekolah lapang peningkatan Kapasitas SDM Pengelola dan Pendamping Perhutanan Sosial, pengukuran karbon, pohon asuh, penyelenggaraan kampanye Perhutanan sosial melalui jurnalisme warga, peliputan dan dokumentasi praktekpraktik pengelolaan hutan yang baik serta fasilitasi pembayaran insentif jasa komunal yang menjaga kawasan hutan melalui fasilitasi pengembangan usaha di perhutanan sosial yang berdampak positif bagi kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Perkembangan perhutanan sosial diseluruh tahapan proses baik usulan, verifikasi, PAK dan Hak Pengelolaan/Izin pemanfaatan secara kumulatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan menggembirakan pada komponen luas areal kelola dan penerima manfaat dari pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat ini erat kaitannya dengan skema perhutanan sosial yang ada, peningkatan unit hutan nagari akan berkorelasi lurus dengan Luas areal kelola dan penerima manfaat mengingat batasan luasan untuk skema hutan nagari bisa seluruh kawasan hutan lindung dan produksi di wilayah administrasi nagarinya disamping personal/masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan hutan nagari akan lebih terbuka dibanding dengan skema HKm dan HTR yang memang terbatas pada jumlah anggota kelompok masing-masing HKm atau HTR.

Tahun 2017, dalam rangka pencapaian target IKU Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebesar Rp. 2.498.000.000,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 2.484.940.900,- atau naik 214,43% dibandingkan anggaran tahun lalu hal ini untuk menunjang kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang semakin bertambah dengan adanya pelimpahan kewenangan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp 2.081.419.350,- atau 83,76 turun 19,8% dibanding realisasi anggaran tahun lalu hal ini disebabkan tidak terealisasinya anggaran sesuai dengan perencanaan yang memperhitungkan telah beroperasinya UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 9 unit sehingga beberapa perjalanan dinas yang direncanakan dilaksanakan oleh KPH tidak terlaksana dengan optimal. Rendahnya realisasi anggaran tidak menyebabkan rendahnya pencapaian target IKU yaitu sebesar 181,06% dari target yang ditetapkan dengan kategori keberhasilan sangat baik.

**Permasalahan:**

1. Belum dipahaminya secara menyeluruh aspek Pemberdayaan masyarakat (Perhutanan Sosial) oleh semua unit kerja Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maupun KPH.
2. Kurangnya tenaga yang memiliki keahlian dalam fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Pengembangan perhutanan sosial/pemberdayaan masyarakat.
3. Adanya perubahan Peraturan yang mendasari pelaksanaan fasilitasi Perhutanan Sosial yang memangkas proses sehingga beberapa proses yang teranggarkan dalam Rencana kerja tidak dapat dilaksanakan dan menjadi sisa anggaran dan mempengaruhi serapan anggaran/kinerja.
4. Kurang dukungan dan koordinasi lintas bidang dalam pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial akibat tidak dipahaminya secara menyeluruh perhutanan sosial oleh semua unit kerja di dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

**Solusi:**

1. Mengupayakan revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat agar sesuai dengan realitas dinamika kebutuhan fasilitasi Perhutanan Sosial sehingga memudahkan perencanaan kegiatan pada seksi Pemberdayaan Masyarakat.
2. Memberikan masukan agar perubahan kebijakan penganggaran/ penundaan anggaran tidak dilakukan di tahun berjalan.
3. Mengusulkan standart pembiayaan khusus untuk kegiatan yang bersifat pemberda yaan masyarakat yang memiliki komponen dan lokasi tertentu.
4. Mengupayakan pendamping komunal bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Instansi/lembaga terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat serta mengoptimalkan pemberdayaan penyuluh kehutanan yang memiliki kapasitas untuk hal dimaksud.

**IV. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**

Tujuan “**Terwujudnya Tata Kelola Pmerintahan yang Efektif dan Efisien**” dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan diukur dengan dua indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Tabel 47 berikut ini.

Tabel 47 Tujuan dan Sasaran Strategis III.

<b>TUJUAN 4</b>	<b>SASARAN 4</b>
Terwujudnya Tata Kelola Pmerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien” merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (Laporan Kinerja) setiap tahun.

Tujuan ini dapat dicapai dengan Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 48.

Tabel 48. Pencapaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Tahun 2017

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	100
		% Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%	86,44%	90,98
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					95,49

Dari Tabel 48 di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis IV pada Tahun 2017 berhasil dicapai dengan baik. Rata-rata capaian sasaran adalah 95,49% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 95,49% di atas adalah tata kelola organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat belum mencapai tata kelola organisasi yang optimal namun masih dalam kategori sangat baik.

Tabel 49. Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2016 dan Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2017	Realisasi	
			2016 (n-1)	2017 (n)
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB
	% Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%	93,58%	86,44%

Dari Tabel 49 dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" Tahun 2017 sama nilainya dengan capaian kinerja pada Tahun 2016 yaitu BB. Dan indikator kinerja "Persentase Capaian realisasi fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan" Tahun 2017 lebih rendah 2,6% dibandingkan dengan capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2016. Hal ini merupakan akibat dari masuknya dana DBH-DR pada anggaran perubahan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 14.744.646.000,- yang tidak dapat direalisasikan disebabkan belum adanya pedoman umum/ petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan dana DBH-DR dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah bersurat ke tim TAPD melalui surat Nomor: 971/5119/Sekr-2017 tanggal 4 Desember 2017 perihal Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi dan Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2018.

Tabel 50. Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	100
	% Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%	86,44%	90,98%

Tabel 50 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun 2017 telah sesuai dengan capaian indikator kinerja target akhir RPJMD dan atau Renstra yaitu sebesar 100%. Namun capaian ini tidak berarti capaian akhir RPJMD dan atau Renstra telah tercapai dengan terealisirnya tingkat kemajuan terhadap capaian akhir RPJMD dan atau Renstra sebesar 100%. Karena capaian akhir RPJMD dan atau Renstra akan tercapai jika hingga Tahun 2021 nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat minimal BB setiap tahunnya. Capaian indikator kinerja "Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan" pada Tahun 2017 belum sesuai dengan target yaitu 95% dan jika dibandingkan dengan akhir capaian RPJMD dan atau Renstra tingkat kemajuannya hanya 90,98%. Capaian kinerja ini perlu menjadi perhatian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah untuk pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Sumatera Barat, sehingga kedepannya dapat lebih memperhatikan tingkat kemajuan hasil capaian.

Tabel 51. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Sumatera Barat Dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Thn 2017		Ket
		Sumbar	Riau	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	B	Lebih tinggi
	% Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	86,44%	-	-

Dari Tabel 51 dapat dilihat bahwa capaian indikator Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja BB artinya kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2016 sudah sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kerja yang handal. Sedangkan Dinas Kehutanan dan

Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi Riau memperoleh nilai B artinya Dinas KLH Provinsi Riau telah memiliki akuntabilitas kinerja baik dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja namun perlu sedikit perbaikan untuk sistem dan perlu banyak terfokus pada perbaikan *soft system*. Indikator kinerja persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan tidak dapat dibandingkan dikarenakan hingga penyusunan Laporan Kinerja ini Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Riau belum dapat merilis data tersebut.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui delapan program yang terdiri atas tujuh program dengan pembiayaan APBD dan satu program dengan pembiayaan APBN, program dimaksud adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (APBD) yang terdiri dari dua belas kegiatan yaitu:
  - a. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
  - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor
  - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - h. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
  - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
  - k. Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi
  - l. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pembangunan Gedung kantor
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - c. Pengadaan Mubelair
  - d. Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor
  - e. Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor
  - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah/Rumah Dinas/Mess
  - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



- i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
- j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Bintek Implementasi Peraturan Perundang- undangan
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Penatausahaan Keuangan SKPD
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan
- 6. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset
  - a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
  - b. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
  - c. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
- 7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK Kegiatan Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Komponen Program, Evaluasi dan Pelaporan sub komponen Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi dan Perencanaan Kehutanan
- 8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang terdiri dari satu kegiatan yaitu:
  - a. Implementasi ISO Pelayanan dan SPIP

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 52 berikut ini.

Tabel 52. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis III Tahun 2017

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	- Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Telaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	- Terpenuhinya pembayaran tagihan rekening Pajak Bumi dan Bangunan	12 Bulan	12 Bulan	100%	

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor, keamanan dan sopir kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya alat-alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	100%	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan untuk dinas dan UPTD	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	- Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100%	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 bulan	12 bulan	100%	
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	- Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	- Tersedianya jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan	12 bulan	100%	
			Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	- Tersedianya jasa pembinaan fisik dan mental aparatur : instruktur senam; pembacaan Al-Quran; Ustadz	12 Bulan	12 Bulan	100%	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung kantor	- Gedung kantor yang terbangun	1 Unit	1 Unit	100%	
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Kebutuhan kendaraan dinas yang terpenuhi	4 Unit	4 Unit	100%	
			Pengadaan Mubelair	- Terlaksananya pengadaan meubelair	32 Unit	32 Unit	100%	
			Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	- Terlaksananya pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	15 Unit	15 Unit	100%	
			Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor	- Terlaksananya pengadaan peralatan/perlengkapan kantor	21 Unit	21 Unit	100%	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	11 Unit	11 Unit	100%	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5 Unit	5 Unit	100%	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	287Unit	287Unit	100%	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Instalasi dan Jaringan	12 Bulan	12 Bulan	100%	

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	- Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	573 Orang	573 Orang	100%	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	15 Kali	15 Kali	100%	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Terlaksananya penyusunan laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan laporan tahunan	5 Dok	5 Dok	100%	
			Penatausahaan Keuangan SKPD	- Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran	12 Bulan	12 Bulan	100%	
		Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan aset	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	- Tersusunnya dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, Renstra	6 Dok	6 Dok	100%	
			Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	10 UPT/KPH	10 UPT/KPH	100%	
			Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	- Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%	
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	- Tersusunnya data dan informasi kehutanan	2 Lap	2 lap	100%	
			Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP	- Terlaksananya implementasi Sosialisasi ISO 9001:2008 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	4 Lap	4 Lap	100%	

Uraian capaian IKU sasaran strategis "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi" adalah sebagai berikut:

### 1. Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" memiliki target BB, terealisasi BB dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan aset seperti terlihat pada Tabel 52 di atas.

Indikator Kinerja Utama "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Provinsi

Sumatera Barat pada Tahun 2016. Akuntabilitas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan dan Sasaran yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana tata kelola harus mengandung visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran tata kelola.
2. Struktur Kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Penetapan Kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
4. Perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan kebutuhan, transparan dan partisipatif, akomodatif terhadap sosial budaya masyarakatsekitar hutan, dan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
5. Penetapan Prosedur Kerja yang tepat dan jelas, mudah dilaksanakan, mudah dimengerti dan transparan, serta mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait yang sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 065/097/Sekr-2017 tentang Standar Operasional Prosedur Aparatur Pemerintah pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Januari 2017. SOP AP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 135 prosedur yang meliputi seluruh unit kerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
6. Sumber Daya Manusia yang kompeten, profesional dan bermoral.
7. Pelaksanaan Kegiatan yang efektif dan efisien, tertib administrasi, transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah, pengelolaan barang inventaris.
8. Sistem Pencatatan yang jelas, akurat dan sederhana.

Laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) tata kelola akan mengacu pada prinsip-prinsip obyektifitas, transparansi, akurasi yang tinggi, serta profesionalisme yang dapat diandalkan.

Penerapan prinsip transparansi dimaksudkan agar data/informasi kegiatan tata kelola pemerintahan termasuk perumusan kebijakan

dan pelaksanaan kerja organisasi, dapat diakses oleh publik. Transparansi menumbuhkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan *stake holders* lainnya sebagaimana yang telah kami lakukan melalui website [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id).

Prinsip partisipasi dimaksudkan agar publik dapat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pengambilan keputusan tata kelola, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dalam menyampaikan pendapat demi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran tata kelola pemerintah yang baik dan berkelanjutan sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui mekanisme PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) melalui PPID masyarakat diberikan akses untuk mengetahui informasi dan dokumentasi yang terdapat pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Capaian Target IKU "Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat" Tahun 2017 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 53 berikut ini.

Tabel 53. Capaian Target IKU Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Per Triwulan Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	a Nilai evaluasi akuntabilitas	0%	BB	BB	BB	0%	100	BB	100%	BB	100%	BB	100%

Dari Tabel 53 diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut setiap triwulannya dapat dicapai sesuai target triwulan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan tata kelola organisasi dilakukan dengan baik.

Untuk mencapai target kinerja indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan implementasi ISO 9001:2015, melaksanakan Sistem Pegendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan melaksanakan kegiatan sesuai Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang disusun.

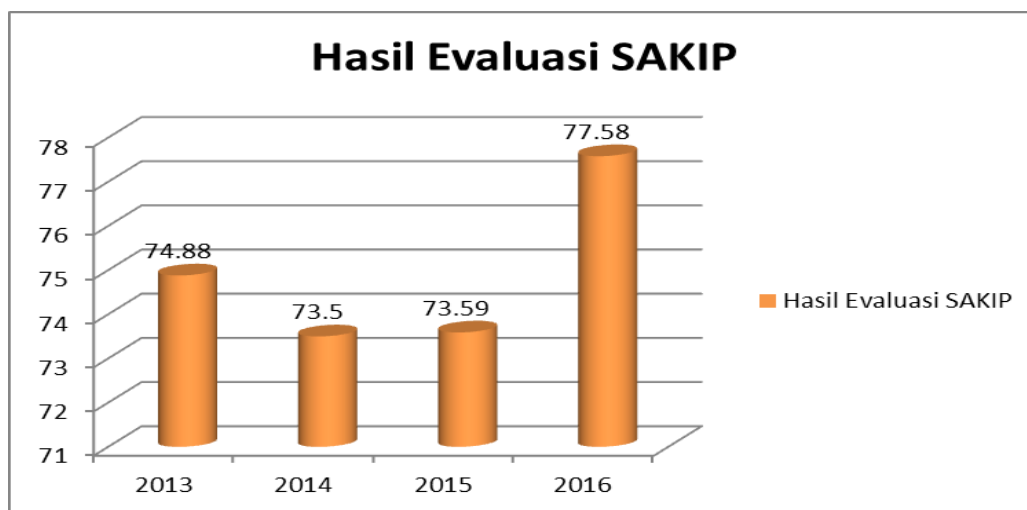
Capaian Kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses tata kelola organisasi yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi

kinerja dan pencapaian sasaran. Rekapitulasi hasil evaluasi akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera pada empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 54 berikut ini.

Tabel 54. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Empat Tahun Terakhir

Tahun	Perencanaan Kinerja (35%)	Pengukuran Kinerja (20%)	Pelaporan (15%)	Evaluasi Kinerja (10%)	Pencapaian Sasaran (20%)	Hasil Evaluasi	Nilai
2013	25,07	14,94	10,88	5,67	18,33	74,88	BB
2014	28,64	15,89	11,47	5,83	11,67	73,50	BB
2015	25,88	17,50	11,32	5,81	13,08	73,59	BB
2016	27,64	16,49	12,68	6,27	14,50	77,58	BB

Dari Tabel 54 di atas terlihat sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan nilai BB pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hal ini merupakan pemacu semangat seluruh Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tata kelola organisasi yang tertib, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan salah satunya adalah dengan mengimplementasikan ISO 9001:2015 secara patuh. Pencapaian nilai SAKIP pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat empat tahun terakhir dapat dilihat dalam Gambar 14 berikut ini.



Gambar 14. Pencapaian Nilai SAKIP Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Empat Tahun Terakhir

Dari Gambar 14 di atas menggambarkan nilai SAKIP pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat empat tahun terakhir sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, namun perlu ditingkatkan sehingga tata

kelola organisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merupakan sebuah sistem dengan pengendalian langsung pada sistem manajemen kerjanya sehingga kesalahan manusia (*human error*) dapat diminimalkan. Dengan tata kelola organisasi yang baik maka diharapkan dapat mempermudah sistem kerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Aplikasi *e-budgeting* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga merupakan inovasi yang meningkatkan Sistem Akuntabilitas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Tahun 2017, dalam rangka pencapaian target IKU Nilai evaluasi akuntabilitas telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebesar Rp. 5.348.184.000,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 5.796.315.600,- atau turun 16,34% dibandingkan anggaran tahun lalu. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp. 4.791.402.486,- atau 82,66% turun 9,18% dibanding realisasi anggaran tahun lalu. Hal ini disebabkan tidak terealisasinya anggaran sesuai dengan perencanaan yang memperhitungkan telah beroperasinya UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 9 unit sehingga beberapa perjalanan dinas yang direncanakan dilaksanakan oleh KPH tidak terlaksana dengan optimal. Rendahnya realisasi anggaran tidak menyebabkan rendahnya pencapaian target IKU yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan dengan kategori keberhasilan sangat baik.

## **2. Indikator Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan**

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan" memiliki target 95%, terealisasi 86,44% dengan tingkat capaian 90,98% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan aset seperti terlihat pada Tabel 54 di atas.

Indikator Kinerja Utama "Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan" diukur dengan

menghitung jumlah realisasi fisik dan realisasi keuangan yang dilaporkan dan dievaluasi setiap bulannya dibagi dengan angka dua dan dikalikan dengan angka 100%. Pada Tahun 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan dana DBH-DR pada anggaran perubahan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 14.744.646.000,- yang tidak dapat direalisasikan disebabkan belum adanya pedoman umum/ petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan dana DBH-DR. Hal ini yang menyebabkan realisasi keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 78,89% dan realisasi fisik sebesar 100%. Adanya pelimpahan kewenangan sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Dana Bagi Hasi-Dana Reboisasi (DBH-DR) yang semula masuk ke kabupaten penghasil maka sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan dana APBN tahun 2017 maka seluruh provinsi penghasil kayu mendapatkan dana DBH-DR melalui mekanisme anggaran perubahan. Hal ini menyebabkan anggaran tersebut tidak dapat digunakan dikarenakan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis penggunaan DBH-DR belum terbit.

Capaian Target IKU "Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan" Tahun 2017 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 55 berikut ini.

Tabel 55. Capaian Target IKU Persentase Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan Per Triwulan Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	a. Persentase Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	25%	50%	75%	100%	30,66	123	36,60	73	60,48	80,64	86,44	86,44

Dari Tabel 55 diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut hanya triwulan I yang melebihi target sedangkan tiga triwulan lainnya belum dicapai sesuai target triwulan yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya mekanisme pergeseran anggaran yang menyebabkan sebagian besar kegiatan baru dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2017. Hal ini akan menjadi perhatian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun yang akan datang



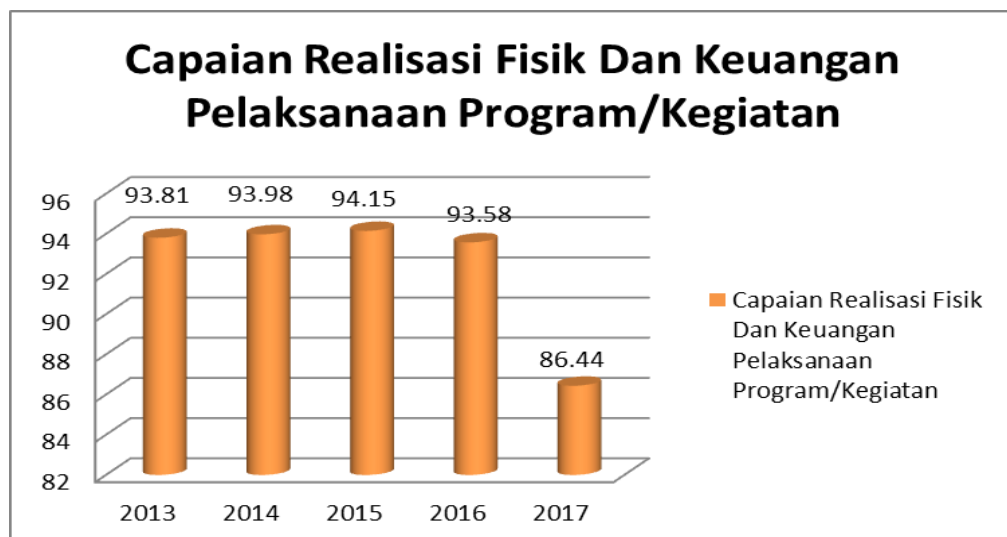
agar lebih menyempurnakan mekanisme perencanaan dan penganggaran dengan melakukan mentoring kepada Eselon IV.

Capaian kinerja persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 56 berikut ini.

Tabel 56. Rekapitulasi Persentase Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Lima Tahun Terakhir

Tahun	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Rata-Rata
2013	87,16	100	93,81
2014	87,96	100	93,98
2015	88,29	100	94,15
2016	87,16	100	93,58
2017	72,89	100	86,44

Dari Tabel 56 diatas terlihat sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat capaian realisasi fisik dan keuangannya belum mencapai 95%. Hal ini disebabkan realisasi keuangan mulai dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 rata-rata hanya 84,69%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan beberapa hal diantaranya kendala teknis di lapangan dan efisiensi penggunaan anggaran. Namun capaian fisik kegiatan mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 adalah 100%. Pencapaian persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan dinas kehutanan provinsi sumatera barat lima tahun terakhir dapat dilihat dalam Gambar 15 berikut ini.



Gambar 15. Persentase Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Lima Tahun Terakhir

Dari Gambar 15 diatas menggambarkan persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan dinas kehutanan provinsi sumatera barat empat tahun terakhir pada dinas kehutanan provinsi sumatera barat lima tahun terakhir belum sesuai dengan target IKU, perlu ditingkatkan sehingga tata kelola organisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik.

Tahun 2017, dalam rangka pencapaian target IKU Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat empat tahun terakhir telah dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebesar Rp. 2.082.828.000,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 1.760.254.000,- atau naik 231,73% dibandingkan anggaran tahun lalu. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp. 1.430.949.600,- atau 81,29 turun 4,36% dibanding realisasi anggaran tahun lalu. Tidak terealisasinya anggaran sesuai dengan perencanaan yang memperhitungkan telah beroperasinya UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 9 unit sehingga beberapa perjalanan dinas yang direncanakan dilaksanakan oleh KPH tidak terlaksana dengan optimal. Rendahnya realisasi anggaran tidak menyebabkan rendahnya pencapaian target IKU yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan dengan kategori keberhasilan sangat baik.

**Permasalahan:**

1. Belum definitifnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebanyak sembilan unit menyebabkan perencanaan dan penganggaran yang semula diperuntukkan untuk operasional UPTD/ Kesatuan Pengelolaan Hutan tersebut tidak dapat dilaksanakan optimal. Hingga anggaran perubahanpun Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat masih optimis KPH terbentuk dan masih mengakomdir dana operasional KPH. Namun hingga saat ini KPH sebagai UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat belum terbentuk.

**Solusi:**

1. Mengupayakan percepatan pengukuhan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
2. Melakukan revisi renstra yang telah mengakomodir kegiatan operasional KPH.
3. Meningkatkan koordinasi antara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan KPH.

**3.4 REALISASI ANGGARAN**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja pada Tahun 2017 sebagaimana Tabel 57 berikut ini.

Tabel 57. Realisasi Anggaran Yang Digunakan Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi Sesuai Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Sisa Anggaran
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan Indikator: 1. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya 2. Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu 3. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kehutanan	Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	- Terpeliharanya batas kawasan hutan	177,539,150	167,665,400	94.44	9,873,750
			Kajian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	- Teridentifikasinya usulan perubahan kawasan hutan dan terlaksananya kajian usulan perubahan kawasan hutan dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat	198,722,000	163,771,900	82.41	34,950,100
			Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	- Terpantau dan termonitornya penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukannya	165,167,825	131,408,700	79.56	33,759,125
			Pembentukan Petak Ukur Permanen	- Terbangunnya petak ukur permanen	579,070,950	440,372,500	76.05	138,698,450
		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN)	Planologi dan Tata Lingkungan	- Terlaksananya penyiapan kelembagaan pembangunan KPH	408,808,000	402,229,550	98.39	6,578,450
		Program Pemanfaatan Potensi SDH	Optimalisasi PNBP	- Laporan monitoring dan evaluasi/ pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan, iuran Kehutanan dan penggunaan peralatan pada IUPHHK Hutan Alam	9,288,000	82,225,850	92.09	7,062,150
			Pengembangan Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman	- Laporan monitoring dan evaluasi/ pembinaan penatausahaan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	75,000,000	63,068,800	84.09	11,931,200

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Sisa Anggaran
			Pengembangan Pengujian, Pengendalian dan Peredaran Hasil Hutan	Laporan monitoring dan evaluasi/ pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan Olahan, Realisasi Pemenuhan bahan baku dan pemasaran hasil hutan, produksi hutan alam dan hutan tanaman	150,000,000	141,279,000	94.19	8,721,000
			Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH)	Laporan monitoring dan evaluasi/ pembinaan penatausahaan peredaran hasil hutan	150,000,000	133,951,300	89.30	16,048,700
			Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu pada Wilayah Kelola KPH	Terbinanya kelompok tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan	150,000,000	125,579,200	83.72	24,420,800
			Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya rencana areal pengembangan hasil hutan bukan kayu pada wilayah KPH	878,342,500	646,350,254	73.59	231,992,246
			Pengelolaan potensi hutan pada wilayah KPH	Tersedianya data potensi wisata alam dan terbentuknya/ terbinanya kelompok kepariwisataan alam pada wilayah Kelola KPH	190,500,000	144,461,700	75.83	46,038,300
Sasaran Strategis I					3,212,438,425	2,642,364,154	82.25	570,074,271
2.	Meningkatnya Kemampuan Hutan Dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya Indikator Sasaran: Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis Persentase penurunan laju kerusakan hutan Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan	Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas	4,200,000,000	1,653,361,300	39.37	2,546,638,700
			Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Tersedianya data produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembangunan hutan tanaman	125,000,000	115,960,450	92.77	9,039,550
			Konservasi Sumber Daya Genetik	Terpeliharanya sumber daya genetik tanaman hutan	60,000,000	47,430,950	79.05	12,569,050
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Pengembangan Sarana Konservasi tanah	Termonitornya bangunan KTA di Kab/Kota Prov Sumbar	100,000,000	93,054,050	93.05	6,945,950
			Monitoring dan pembinaan Kegiatan RHL	Terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/Reklamasi/D AK oleh Kab/Kota	370,000,000	348,338,150	94.15	21,661,850
			Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan DAS	Tersusunnya rencana pengelolaan DAS	200,000,000	167,932,268	83.97	32,067,732
			Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Kritis di Wilayah Kelola KPH	Tersedianya data lahan kritis di wilayah kelola KPH	906,036,000	613,681,300	67.73	292,354,700

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Sisa Anggaran
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	- Terlaksananya psikotes, operasi intelijen, operasi prefresif/ pamhut, movev kasus, tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) dan Koordinasi	8,148,041,064	1,599,037,748	19.62	6,549,003,316
			Pengendalian Ekowisata dan Jasa Lingkungan	- Terlaksananya identifikasi dan fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan	216,900,000	168,073,150	77.49	48,826,850
			Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	- Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana dan tersosialisasinya bahaya kerusakan hutan	99,163,000	90,228,050	90.99	8,934,950
			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	- Terlaksananya pelatihan dan Penguatan Lembaga PPHBN	994,700,000	963,044,700	96.82	31,655,300
			Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	- Terlaksananya pengumpulan data PEP RAD-GRK sektor berbasis kehutanan	200,000,000	175,096,850	87.55	24,903,150
			Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH	- Termonitornya kondisi pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data satwa dan tumbuhan liar dikawasan hutan wilayah kelola KPH	474,000,000	410,288,250	86.56	63,711,750
			Identifikasi dan inventarisasi serta pengembangan kawasan ekosistem essensial dan daerah	- Terbentuk dan teridentifikasinya kawasan ekosistem essensial di Provinsi Sumatera Barat	417,702,000	354,745,200	84.93	62,956,800
			Monitoring evaluasi dan pembinaan pengelolaan ekosistem essensial dan daerah penyangga	- Termonitornya pengelolaan kawasan ekosistem essensial di Provinsi Sumatera Barat	38,300,000	27,995,750	73.10	10,304,250
		Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Terlaksananya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta bimbingan teknis kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)	8,370,646,000	1,055,266,250	12.61	7,315,379,750
Sasaran Strategis II					24,920,488,064	7,883,534,416	31.63	17,036,953,648

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Sisa Anggaran
3.	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Indikator Sasaran: Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat Indikator: 1. Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan	- Terlaksananya Musrenbanghutda , koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota	116,171,000	100,281,550	86.32	15,889,450
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan	- Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan	300,000,000	289,641,600	96.55	10,358,400
			Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan	- Meningkatnya kelompok/ lembaga masyarakat yang mengelola hutan (HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan)	1,050,000,000	845,614,400	80.53	204,385,600
			Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	- Terjalannya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan)	100,000,000	90,820,600	90.82	9,179,400
			Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan dan Penguatan Kelembagaan Tani Hutan	- Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di Sumatera Barat	380,000,000	350,269,450	92.18	29,730,550
			Pengembangan Hutan Mangrove	- Peningkatan SDM masyarakat dalam mengelola hutan mangrove	150,000,000	47,823,500	95.65	2,176,500
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Terlaksananya BOP kehutanan	268,800,000	268,520,000	99.90	280,000
				- Terlaksananya Peningkatan Kelompok Tani Hutan dari Pemula menjadi Madya	150,000,000	150,000,000	100	0
Sasaran Strategis III					2,414,971,000	2,142,971,100	88.74	271,999,900
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	- Tersusunnya data dan informasi kehutanan	249,270,000	202,546,750	81.26	46,723,250
			Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP	- Terlaksananya implementasi Sosialisasi ISO 9001:2008 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	249,270,000	202,546,750	81.26	46,723,250
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Indikator: 1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	- Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat	100,000,000	76,314,150	76.31	23,685,850
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	527,500,000	293,410,941	55.62	234,089,059
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	- Terpenuhiannya pembayaran tagihan rekening Pajak Bumi dan Bangunan	1,000,000	989,323	98.93	10,677
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor, keamanan dan sopir kantor	1,055,920,360	980,140,241	92.82	75,780,119
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya alat-alat tulis kantor	125,000,000	124,919,000	99.94	81,000

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Sisa Anggaran
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan untuk dinas dan UPTD	120,000,000	120,000,000	100	0
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	- Terlaksananya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	62,000,000	62,000,000	100	0
			Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-undangan	41,400,000	10,704,000	25.86	30,696,000
			Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makanan dan minuman rapat	75,000,000	52,034,000	69.38	22,966,000
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	- Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	551,000,000	423,542,379	76.87	127,457,621
			Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	- Tersedianya jasa dokumentasi dan publikasi	8,500,000	8,500,000	100	0
			Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	- Tersedianya jasa pembinaan fisik dan mental aparatur : instruktur senam; pembacaan Al-Quran; Ustadz	15,000,000	14,000,000	93.33	1,000,000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung kantor	- Gedung kantor yang terbangun	199,000,000	194,745,000	97.86	4,255,000
			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Kebutuhan kendaraan dinas yang terpenuhi	1,276,500,000	1,225,708,500	96.02	50,791,500
			Pengadaan Mubelair	- Terlaksananya pengadaan meubelair	100,000,000	97,888,000	97.89	2,112,000
			Pengadaan peralatan/perengkapan gedung kantor	- Terlaksananya pengadaan peralatan/perengkapan gedung kantor	34,500,000	34,331,000	99.51	169,000
			Pengadaan peralatan/perengkapan kantor	- Terlaksananya pengadaan peralatan/perengkapan kantor	115,500,000	114,566,000	99.19	934,000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	75,000,000	74,708,000	99.61	292,000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100,000,000	99,821,000	99.82	179,000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional	415,000,000	292,034,552	70.37	122,965,448
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	- Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	200,000,000	56,630,000	28.32	143,370,000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	- Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	60,000,000	59,872,000	99.79	128,000
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	- Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	309,420,000	264,069,000	85.34	45,351,000

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Sisa Anggaran
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bintek implementasi peraturan perundang-undangan	229,075,240	110,475,400	48.23	118,599,840
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Terlaksananya penyusunan laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan laporan tahunan	74,880,000	73,181,350	97.73	1,698,650
			Penatausahaan Keuangan SKPD	- Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran	337,700,000	334,438,600	99.03	3,261,400
		Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan aset	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	- Tersusunnya dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, Renstra	815,366,000	618,059,300	75.80	197,306,700
			Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	278,480,000	225,594,250	81.01	52,885,750
			Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD	- Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD	253,828,000	179,676,100	70.79	74,151,900
		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Program, evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan administrasi dan perencanaan kehutanan	102,792,000	96,074,600	93.47	6,717,400
Sasaran Strategis IV					8,148,131,500	6,675,394,936	81.93	1,472,736,564

Dari Tabel 57 diatas dapat dilihat bahwa serapan anggaran Tahun 2017 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 23.020.982.989,- dan menjadi Rp. 37.765.628.989,- pada anggaran perubahan. Pada Tahun 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mendapat tambahan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) sebesar Rp. 14.744.646.000,- namun dana BDH-DR tersebut tidak dapat digunakan dikarenakan belum adanya pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan penggunaan dana tersebut. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target kinerja empat sasaran startegis diatas adalah sebesar Rp. 18.427.440.456,- atau 48,79% terhadap alokasi dana perubahan dan 80,05% terhadap dana diluar DBH-DR. Artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.593.542.533,- atau 19,95% naik dari



efisiensi anggaran pada tahun lalu yaitu 12,84% dan dana yang tidak dapat digunakan sebesar Rp. 14.744.646.000,-. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target ke empat sasaran strategis dengan rata-rata sasaran sebesar 211,24% dengan kategori keberhasilan sangat baik.

Rincian serapan anggaran masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis ini dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebesar Rp. 3,681,329,925 ,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 3,212,438,425,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis I adalah sebesar Rp. 2,642,364,154 – atau 82.25% terhadap alokasi dana perubahan. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran. Realisasi semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis I ini secara keseluruhan 100%.

2. Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis ini dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebesar Rp. 10,422,241,064,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 24,920,488,064,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis II adalah sebesar Rp. 7,883,534,416,- atau 32 % terhadap alokasi dana perubahan. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran. Realisasi semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Staretgis II ini secara keseluruhan 100%. Kecilnya realisasi disebabkan pada Sasaran Strategis II diatas terdapat penambahan dana yang bersumber dari DBH-DR untuk kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Hutan, kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis III ini dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebesar Rp. 2,416,800,000,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 2,414,971,000,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis III adalah sebesar Rp. 2,142,971,100,- atau 88.74% terhadap alokasi dana perubahan. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran. Realisasi semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Staretgis III ini secara keseluruhan 100%.

4. Meningkatnya tata kelola organisasi

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis IV ini dialokasikan dana pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebesar Rp. 7,431,012,000,- dan mengalami perubahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 8,148,131,500,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis III adalah sebesar Rp. 6,675,394,936,- atau 81.93% terhadap alokasi dana perubahan. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran. Realisasi semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis IV ini secara keseluruhan 100%.

Untuk menunjang tercapainya empat sasaran di atas juga didukung oleh belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja tambahan penghasilan pegawai dan insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp. 44.982.578.176,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.884.620.624,- atau sekitar 93,61%.

Memperhatikan realisasi serapan anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh sebagaimana yang terdapat pada Tabel 57 di atas maka kinerja keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat belum berhasil untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja keuangan sebesar 86,44%. Realisasi semua kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini pada umumnya sudah diatas 85%. Adapun kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 90% adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 76.314.150 (tujuh puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu seratus lima puluh rupiah) atau (76,31%) dengan fisik (100%).  
Sisa anggaran sebesar Rp. 23.685.850,- merupakan sisa mati dari anggaran BBM dan Caraka, dibayarkan sesuai dengan kebutuhan dinas dan UPTD Dinas Kehutanan.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp. 527.500.000,- (Lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 293.410.941,- (Dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah) atau (55,62%) dengan fisik (100%).  
Sisa anggaran sebesar Rp. 234.089.059,- merupakan sisa mati kegiatan, dimana kantor-kantor KPH yang berada di Kabupaten/kota masih ditanggung oleh masing-masing kabupaten/kota.
3. Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan dana sebesar Rp. 41.400.000,- (Empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 10.704.000,- (Sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) atau (25,86%) dengan fisik (100%).  
Sisa anggaran sebesar Rp. 30.696.000,- merupakan sisa mati, dibayarkan sesuai dengan kebutuhan Dinas Kehutanan kecuali untuk UPTD KPH tidak dibayarkan karena status KPH yang belum defenitif.
4. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum dengan dana sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 52.034.000,- (Lima puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah) atau (69,38%) dengan fisik (100%).  
Sisa anggaran sebesar Rp. 22.966.000,- merupakan sisa mati kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan rapat yang dilaksanakan.
5. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dengan dana sebesar Rp. 551.000.000,- (Lima ratus lima puluh satu juta rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 423.542.379,- (Empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) atau (76,87%) dengan fisik (100%).

Sisa anggaran sebesar Rp. 127.457.621,- merupakan efisiensi belanja barang dan jasa berupa bahan bakar, perjalanan dinas dan honorarium.

6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dengan dana sebesar Rp. 415.000.000,- (Empat ratus lima belas juta rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 292.034.552,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) atau (70,37%) dengan fisik (100%).

Sisa anggaran sebesar Rp. 122.965.448,- merupakan sisa mati. Besarnya sisa dana karena ada beberapa aset yang terletak di Kabupaten/ Kota belum jelas statusnya karena masih ada yang tercatat di Kabupaten/ Kota.

7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 56.630.000,- (Lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) atau (28,32%) dengan fisik (100%).

Sisa anggaran sebesar Rp. 143.370.000,- merupakan sisa mati kegiatan. Peralatan dan perlengkapan kantor yang berada di Kabupaten/ Kota belum jelas status.

8. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya dengan dana sebesar Rp. 309.420.000,- (Tiga ratus sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 264.069.000,- (Dua ratus enam puluh empat juta enam puluh sembilan ribu rupiah) atau (85,34) dengan fisik (100%).

Sisa anggaran sebesar Rp. 45.351.000,- merupakan sisa mati kegiatan. jumlah yang dibayarkan disesuaikan dengan jumlah pegawai Dinas Kehutanan.

9. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan dana sebesar Rp. 229.075.240,- (Dua ratus dua Sembilan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 110.475.400,- (Seratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) atau (48,23%) dengan fisik (100%).

Sisa anggaran sebesar Rp. 118.599.840,- merupakan sisa mati kegiatan, dimana kegiatan tersebut tergantung dengan jumlah undangan Bimtek yang diterima.

10. Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD dengan dana setelah perubahan sebesar Rp. 815.366.000 (Delapan ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 618.059.300 (Enam ratus delapan belas juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) atau (75,80) dengan fisik (100%)

Sisa anggara sebesar Rp. 197.306.700,- merupakan sisa mati kegiatan dan efisiensi dari sub kegiatan Bahan Bakar Minyak, Perjalanan Dinas (Penginapan, transportasi dan perjalanan dinas eselon).

11. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD dengan dana setelah perubahan sebesar Rp. 278.480.000,- (Dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 225.594.250,- (Dua ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan persentase keuangan sebesar 81,01% dan pelaksanaan fisik sebesar 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 52.885.750,- yang merupakan sisa mati kegiatan. Efisiensi ini terdapat pada sub kegiatan Perjalanan Dinas (Penginapan, Transportasi, dan Perjalanan dinas eselon yang dilaksanakan oleh staf/ tingkatan dibawahnya), penghematan pada bahan bakar minyak dan rasionalisasi penggandaan.

12. Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD dengan dana setelah perubahan sebesar Rp. 253.828.000 (Dua ratus lima puluh tiga juta rupiah delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 179.676.100 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) dengan persentase keuangan 70,79 % dan realisasi fisik sebesar 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 74.151.900,- merupakan sisa mati kegiatan dari bebera sub kegiatan yang merupakan bagian dari efisiensi dan penghematan. Adapun sisa anggaran ini merupakan honor pengurus barang pembantu yang berada pada setiap KPH yang tidak dibayarkan karena belum defenitifnya KPH yang di bentuk di daerah.

13. Kegiatan Kajian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan dana sesudah perubahan anggaran sebesar Rp. 198.722.000,-

(Seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 163.771.900,- (Seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dengan persentase keuangan sebesar 82,41% dan fisik sebesar 100%.

Sisa anggaran sebesar Rp. 34.950.100,- merupakan sisa mati kegiatan. adapun sub kegiatan tersebut berupa Perjalanan Dinas (penginapan, uang perjalanan dinas, transportasi, tiket, dan penginapan narasumber).

14. Kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan dengan nilai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 165.167.825,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 131.408.700,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 79,56% dan fisik 100%.

Sisa anggaran sebesar Rp. 33.759.125,- merupakan sisa mati kegiatan dari sub kegiatan Perjalanan Dinas. Merupakan penghematan dan efisiensi dari penginapan, dan transportasi / tiket serta perjalananan dinas yang diperuntukan untuk eselon yang dilaksanakan oleh staf/ tingkatan yang berada dibawahnya, selain perjalanan dinas juga dari Bahan Bakar Minyak dan penggandaan.

15. Kegiatan Petak Ukur Permanen memiliki nilai anggaran setelah sebesar Rp. 579.070.950 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh ribu sembilan lima puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 440.372.500,- atau sebesar 76,05% dan fisik kegiatan 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 138.698.450,- merupakan sisa mati kegiatan. adanya efisiensi dari sub kegiatan Belanja peralatan pakai habis, Belanja penggandaan, Belanja perjalanan dinas yang merupakan sisa penginapan dan tiket pesawat.

16. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan memiliki nilai anggaran setelah perubahan Rp. 116.171.000,- (Seratus enam belas juta serratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.281.550,- atau sebesar 86,32% dan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar 15.889.450,- yang merupakan sisa mati kegiatan. Rendahnya realisasi anggaran pada kegiatan tersebut merupakan penghematan/ efisiensi dari beberapa sub kegiatan Belanja BBM, Penghematan perjalanan dinas dalam daerah (sisa

penginapan), perjalanan dinas luar daerah (sisa penginapan dan sisa tiket) dan penghematan honorarium tenaga ahli/ instruktur/ narasumber dikarenakan awalnya direncanakan pembayaran honorarium diperuntukan untuk eselon III namun yang hadir adalah eselon IV sehingga pembayaran sesuai standar eselon IV.

17. Kegiatan Penyiapan, pembinaan dan pengembangan HKm, HN, HTR, dan HR Kemitraan memiliki nilai anggaran sebesar 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), dengan realisasi keuangan kegiatan sebesar Rp. 845.614.200,- atau sebesar 80,53% dan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 204.385.600,- yang merupakan sisa mati kegiatan. rendahnya realisasi anggaran merupakan penghematan atau efisiensi dari beberapa sub kegiatan seperti Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah (Penginapan, tiket, transportasi serta pelaksana kegiatan), Belanja Bahan Bakar Minyak, dan belanja penggandaan.

18. Kegiatan Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.068.800,- atau sebesar 84,09% dengan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 11.931.200,- merupakan sisa mati kegiatan. Rendahnya realisasi keuangan merupakan penghematan dan efisien dari beberapa sub kegiatan Belanja Bahan Bakar, Belanja Penggandaan, Perjalanan Dinas (sisa penginapan dan transportasi) dan perjalanan dinas yang diperuntukan untuk beberapa eselon dilaksanakan oleh tingkatan eselon yang berada dibawahnya.

19. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan HHBK memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 133.951.300,- atau sebesar 89,30% dengan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 16.048.700,- merupakan sisa mati kegiatan. tidak tercapainya realiasi keuangan sesuai target merupakan langkah efisiensi/ penghematan kepada beberapa sub kegiatan seperti Belanja Bahan Bakar, Belanja Penggandaan, Perjalanan Dinas (sisa penginapan dan transportasi).

20. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH) memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh

juta rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 125.579.200,- atau sebesar 83,72% dengan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 24.420.800,- merupakan sisa mati kegiatan. tidak tercapainya realiasi keuangan sesuai target merupakan langkah efisiensi/ penghematan kepada beberapa sub kegiatan seperti Belanja Bahan Bakar, Belanja Penggandaan, Perjalanan Dinas (sisa penginapan dan transportasi).

21. Kegiatan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu Pada Wilayah Kelola KPH memiliki nilai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 878.342.500,- (Delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 646.350.254,- atau sebesar 73,59% dengan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 231.992.246,- merupakan sisa mati kegiatan. tidak tercapainya realiasi keuangan sesuai target merupakan langkah efisiensi/ penghematan kepada beberapa sub kegiatan seperti Belanja Bahan Bakar, Belanja Penggandaan, Perjalanan Dinas (sisa penginapan, tiket, pelaksana perjalanan dinas dan transportasi).

22. Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan Pada Wilayah KPH memiliki nilai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 144.461.700,- atau sebesar 75,83% dengan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 46.038.300,- merupakan sisa mati kegiatan. tidak tercapainya realiasi keuangan sesuai target merupakan langkah efisiensi/ penghematan kepada beberapa sub kegiatan seperti Belanja Bahan Bakar, Belanja Penggandaan, Perjalanan Dinas (sisa penginapan dan transportasi).

23. Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Hutan memiliki nilai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 1.653.361.300,- atau sebesar 39,37% dengan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 2.546.638.700,- merupakan sisa mati kegiatan. tidak tercapainya realiasi keuangan sesuai target merupakan langkah efisiensi/ penghematan kepada beberapa sub kegiatan seperti Belanja Bahan Bakar, Belanja Penggandaan,



Perjalanan Dinas (sisa penginapan dan transportasi). Selain itu kegiatan ini mendapat tambahan dana dari Dana DBH-DR yang untuk penggunaannya tidak bisa dilaksanakan karena belum ada aturan yang jelas mengenai penggunaan dana tersebut.

24. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Genetik memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 47.430.950,- atau sebesar 79,05% dengan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 12.569.050,- merupakan sisa mati kegiatan. tidak tercapainya realiasi keuangan sesuai target merupakan langkah efisiensi/ penghematan kepada beberapa sub kegiatan seperti Belanja Bahan Bakar, Belanja Penggandaan, Perjalanan Dinas (sisa penginapan dan transportasi).

25. Kegiatan Pengendalian Ekowisata dan Jasa Lingkungan memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 216.900.000,- (Dua ratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 168.073.150,- atau sebesar 77,49% dengan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 48.826.850,- merupakan sisa mati kegiatan. tidak tercapainya realiasi keuangan sesuai target merupakan langkah efisiensi/ penghematan kepada beberapa sub kegiatan seperti Belanja Bahan Bakar, Belanja Penggandaan, Perjalanan Dinas (sisa penginapan dan transportasi).

26. Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 175.096.850,- atau sebesar 87,55% dengan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 24.903.150,- merupakan sisa mati kegiatan. tidak tercapainya realiasi keuangan sesuai target merupakan langkah efisiensi/ penghematan kepada beberapa sub kegiatan seperti Belanja Bahan Bakar, Belanja Penggandaan, Perjalanan Dinas (sisa penginapan dan transportasi).

27. Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan memiliki nilai anggaran setelah perbuhan sebesar Rp. 8.148.041.064,- (Delapan milyar serratus empat puluh delapan juta empat puluh satu ribu enam puluh empat rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 1.59.037.748,- atau sebesar 19,62% dengan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 6.549.003.316,- merupakan sisa mati kegiatan. tidak tercapainya realiasi keuangan sesuai target merupakan langkah efisiensi/ penghematan kepada beberapa sub kegiatan seperti Belanja Bahan Bakar, Belanja Penggandaan, Perjalanan Dinas (sisa penginapan dan transportasi) serta beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan terkait belum defenitifnya UPTD KPH Dinas Kehutanan. Selain hal tersebut, pada kegiatan ini juga mendapat tambahan anggaran dari dana DBH-DR yang tidak dapat dilaksanakan karena belum jelasnya aturan dan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

28. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Serta Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial dan Daerah Penyangga memiliki nilai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 417.702.000,- (Empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 354.745.200,- atau sebesar 84,93% dengan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 62.956.800,- merupakan sisa mati kegiatan. tidak tercapainya realiasi keuangan sesuai target merupakan langkah efisiensi/ penghematan kepada beberapa sub kegiatan seperti Belanja Bahan Bakar, Belanja Penggandaan, Perjalanan Dinas (sisa penginapan dan transportasi).

29. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial dan Daerah Penyangga memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 38.300.000,- (Tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 27.995.750,- atau sebesar 73,10% dengan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 10.304.250,- merupakan sisa mati kegiatan. tidak tercapainya realiasi keuangan sesuai target merupakan langkah efisiensi/ penghematan kepada beberapa sub kegiatan seperti Belanja Bahan Bakar, Belanja Penggandaan, Perjalanan Dinas (sisa penginapan dan transportasi).

30. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan memiliki nilai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 249.270.000,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 202.546.750,- atau sebesar 81,26% dengan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 46.723.250,- merupakan sisa mati kegiatan. tidak tercapainya realiasi keuangan sesuai target merupakan langkah efisiensi/ penghematan kepada beberapa sub kegiatan seperti Belanja Bahan Bakar, Belanja Penggandaan, Perjalanan Dinas (sisa penginapan dan transportasi).

31. Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan dan SPIP memiliki nilai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 239.499.900,- (Dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 154.421.500,- atau sebesar 64,48% dengan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 85.078.400,- merupakan sisa mati kegiatan. tidak tercapainya realiasi keuangan sesuai target merupakan langkah efisiensi/ penghematan kepada beberapa sub kegiatan seperti Belanja Bahan Bakar, Belanja Penggandaan, Perjalanan Dinas (sisa penginapan dan transportasi) serta ada sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu audit internal ke UPTD KPH, ini disebabkan karena belum defenitifnya UPTD KPH tersebut.

32. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan DAS memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 167.932.268,- atau sebesar 83,97% dengan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 32.067.732,- merupakan sisa mati kegiatan. tidak tercapainya realiasi keuangan sesuai target merupakan langkah efisiensi/ penghematan kepada beberapa sub kegiatan seperti Belanja Bahan Bakar, Belanja Penggandaan, Perjalanan Dinas (sisa penginapan dan transportasi).

33. Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Kritis di Wilayah Kelola KPH memiliki nilai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 906.036.000,- (Sembilan ratus enam juta tiga puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 613.681.300,- atau sebesar 67,73% dengan realisasi fisik 97,50%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 292.354.700,- merupakan sisa mati kegiatan. tidak tercapainya realiasi keuangan sesuai target merupakan langkah efisiensi/ penghematan kepada beberapa sub kegiatan seperti Belanja Bahan Bakar, Belanja Penggandaan, Perjalanan Dinas (sisa penginapan dan transportasi).

34. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan memiliki nilai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 8.370.646.000,- (Delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 1.055.266.250,- atau sebesar 12,61% dengan realisasi fisik 98%.

Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 7.315.379.750,- merupakan sisa mati kegiatan. tidak tercapainya realiasi keuangan sesuai target merupakan langkah efisiensi/ penghematan kepada beberapa sub kegiatan seperti Belanja Bahan Bakar, Belanja Penggandaan, Perjalanan Dinas (sisa penginapan dan transportasi). Pada kegiatan ini ada penambahan anggaran sesuai pagu diatas dari dana DBH-DR yang mana tidak dapat digunakan karena belum ada aturan atau petunjuk yang jelas terkait penggunaan dana tersebut sehingga terhalang dengan kewenang Dinas Kehutanan Provinsi sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

Secara keseluruhan capaian kinerja Tahun 2017 dianggap berhasil meskipun ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya terlambat oleh faktor teknis diluar kontrol perencanaan, namun dengan upaya, strategi dan peningkatan koordinasi yang dijalankan oleh jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kendala dan hambatan dapat dicarikan jalan pemecahannya.

## **BAB IV. PENUTUP**

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang telah dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis.

Perbaikan sistem AKIP yang telah dilakukan terhadap lima komponen sistem AKIP adalah:

1. Perencanaan Kinerja

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra dengan menambahkan indikator outcome di samping indikator output yang telah ada sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja

Perbaikan dalam pengukuran kinerja difokuskan terutama pada perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan melakukan monitoring dan evaluasi indikator kinerja minimal sekali dalam enam bulan.

3. Pelaporan Kinerja

Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan menyusun laporan realisasi kinerja dan anggaran bulanan APBD dan APBN tepat pada waktunya sebagai dasar untuk menyusun Laporan Kinerja tahunan. Sebelum menyusun laporan bulanan APBD dan APBN dilakukan rekonsiliasi data realisasi keuangan antara Subbag Keuangan dan Subbag Program sehingga data realisasi keuangan dalam laporan bulanan APBD dan APBN sama dengan data realisasi keuangan dalam LRA.

#### 4. Evaluasi Kinerja

Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal dalam bentuk rapat monev bulanan, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

#### 5. Capaian Kinerja

Perbaikan capaian kinerja dilakukan melalui penuntasan tindak lanjut hasil audit/evaluasi Inspektorat tahun sebelumnya agar tidak berulang kembali di Tahun 2017.

Seluruh rencana capaian kinerja Tahun 2017 secara substansi dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya kurang tepat waktu (terlambat) oleh beberapa faktor teknis dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat di minimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya, hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* bidang kehutanan sebagai bagian integral dari pembangunan kehutanan itu sendiri, seperti terlihat pada Tabel 58.

Tabel 58. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2017

<b>Sasaran</b>	<b>Jumlah IKU</b>	<b>Capaian Sasaran (%)</b>
<i>Sasaran 1</i>	3	102.67
<i>Sasaran 2</i>	3	407.05
<i>Sasaran 3</i>	1	181.06
<i>Sasaran 4</i>	2	95.49
<b>Rata-rata</b>	<b>9</b>	<b>211.24</b>

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih adanya konflik kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan secara operasional masih terkendala dengan peta dasar yang tersedia, masih ada tumpang tindih dan *non prosedural* perizinan.

2. Pengumpulan data penanaman di dalam dan di luar kawasan hutan pada Tahun 2012 belum dilakukan secara keseluruhan pada seluruh lokasi penanaman dikarenakan kurangnya sumber daya.
3. Lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran di bidang kebakaran hutan dan lahan.
4. Hotspot banyak terdapat di luar kawasan hutan namun upaya instansi terkait di daerah dalam pengendalian kebakaran lahan masih kurang.
5. Kurangnya tenaga yang memiliki keahlian dalam fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Pengembangan perhutanan sosial/pemberdayaan masyarakat.
6. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan.
7. Adanya penambahan anggaran DBH-DR pada anggaran perubahan menyebabkan rendahnya realisasi anggaran Tahun 2017 secara keseluruhan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain:

1. Melakukan identifikasi konflik tenurial, melakukan identifikasi, monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan di Kab/Kota;
2. Pada Tahun 2018 telah dianggarkan sub kegiatan monitoring dan evaluasi penanaman tahun 2013 secara tepat sehingga dapat dilakukan pada awal tahun sehingga penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan dan lokasi yang akan dimonitoring tingkat keterwakilannya terhadap objek evaluasi diharapkan akan menjadi lebih tinggi.
3. Peningkatan peran dan kerjasama dalam peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan seperti: apel siaga, sosialisasi, dan lain-lain.
4. Melengkapi MPA dan kelompok tani pengamanan swadaya dengan sarpras pemadam kebakaran.
5. Mengupayakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Instansi/lembaga terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat serta mengoptimalkan pemberdayaan penyuluh kehutanan yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan kinerja perhutanan sosial.

6. Melakukan percepatan pengukuhan UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
7. Melakukan upaya percepatan pelaksanaan penggunaan DBH- DR sesuai aturan yang berlaku.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada jenjang institusi yang lebih tinggi dan *steakholders* yang berkepentingan serta dapat menambah data/informasi penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam Pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat.



# Lampiran